



**KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



# LAPORAN TAHUNAN 2024

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	i
<b>KATA PENGANTAR</b>	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Dasar Hukum .....	3
D. Gambaran Umum.....	3
E. Tugas dan fungsi.....	4
F. Struktur Organisasi.....	10
<b>BAB II PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024.....</b>	<b>13</b>
<b>BAB III CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....</b>	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	16
I. Divisi Administrasi.....	
II. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.....	58
III. Divisi Pemasyarakatan	96
IV. Divisi Keimigrasian	103
B. Realisasi Anggaran.....	120
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>124</b>
A. Kesimpulan.....	124
B. Rencana Kerja Tahun 2025.....	124

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Ucapan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja Tahunan Kanwil Kemenkumham DIY tahun 2024. Laporan ini adalah bagian dari implementasi transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka good governance dan pelayanan publik di lingkungan Kanwil Kemenkumham DIY, sebagai kementerian atau lembaga di sektor publik yang mengemban tugas Kemenkumham dalam wilayah Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Kinerja Tahunan tahun 2024 ini merupakan ruang lingkup pertanggungjawaban Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY dalam memenuhi pelayanan publik.

Kanwil Kemenkumham DIY telah melalui berbagai dinamika yang mempengaruhi kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Berbagai upaya perbaikan kinerja telah dilakukan dalam setiap tantangan dan hambatan yang dihadapi dan juga dari tahun ke tahun mengalami perubahan yang signifikan di era globalisasi maupun teknologi yang semakin berkembang. Untuk itu dalam Laporan Kinerja Kanwil Kemenkumham DIY tahun 2024 ini segenap capaian kinerja dan kegiatan kami sajikan. Sebagai gambaran pelaksanaan tugas pada tahun anggaran 2024, realisasi anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY dan jajaran berada pada angka **99,39 %** (Sembilan puluh sembilan koma tiga puluh sembilan persen), baik dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi dan fasilitatif Kantor Wilayah Hukum dan HAM maupun kegiatan teknis lainnya.

Dengan demikian harapan publik akan mendapatkan pelayanan sesuai aturan bisa terwujud dan masyarakat memperoleh kepastian. Hendaknya kita lebih membangun semangat pengabdian, kita tingkatkan kinerja lebih keras, lebih keras, dan lebih keras lagi. Tumbuhkan semangat kerja Nyata, kerja PASTI dan kami PASTI, pasti profesional, pasti akuntabel, pasti sinergi, pasti transparan dan pasti inovatif.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, Januari 2025  
Kepala Kantor Wilayah



Agung Rektono Seto

**A. LATAR BELAKANG**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang bertanggungjawab langsung kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah mempunyai tugas dan fungsi dalam pelaksanaannya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah bersinergi dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat bekerja sama dengan instansi terkait.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Propinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah dan dibantu oleh para Kepala Divisi (Administrasi, Pemasarakatan, Keimigrasian serta Pelayanan Hukum dan HAM). Tugas Kepala Kantor Wilayah yaitu melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam wilayah propinsi dengan berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai fungsi diantaranya;

- a. Pelayanan urusan bagian administrasi di lingkungan Kantor Wilayah;
- b. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
- c. Pertanggung jawaban di bagian pengelolaan keuangan dan BMN;
- d. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum,
- e. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, Pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum,
- f. Pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia;
- g. Serta pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang Pemasarakatan.

Dalam suatu organisasi pemerintahan salah satu instrumen membentuk akuntabilitas atas pelaksanaan kinerja laporan Tahunan Tahun 2024 ini, Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY sebagai Instansi Pemerintah dan unsur Penyelenggara Negara

menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerjanya selama kurun waktu 1 (satu) Tahun terakhir. Perbaikan kinerja perlu untuk terus dilakukan Penyusunan Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2024 Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk perbaikan kinerja Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY pada tahun berikutnya. Selain itu, pelaporan ini juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY pada Tahun 2024 kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

## **B. MAKUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Capaian Kinerja Laporan Tahunan tahun 2024 mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY;
2. Kantor Wilayah memastikan program kerja dan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan tepat waktu;
3. Memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen dalam upaya peningkatan kinerja baik dalam bentuk regulasi, distribusi dan alokasi Sumber Daya Manusia yang dimiliki Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY tahun 2024;
4. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan tahun 2024 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran kinerja kegiatan secara bertahap dan berkesinambungan;
5. Sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi pengambil Keputusan untuk melakukan perbaikan di setiap pemangku kegiatan selama periode berjalan
6. Merumuskan masukan dalam menentukan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY.

### C. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Tahunan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 ini berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 34 Tahun 2018 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM;
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024;
4. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH.01.OT.01.01 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja di lingkungan Kemenkumham Tahun 2024

### D. GAMBARAN UMUM



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Instansi vertikal sebagai pelaksana program dan tugas-tugas serta kebijakan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di daerah. Sebagian kegiatan berupa Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dari kegiatan Administrasi, Pelayanan Jasa Hukum dan HAM di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta serta Unit kerja Pemasarakatan dan, Unit kerja Keimigrasian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: 30 Tahun 2018, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Propinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor wilayah dan dibantu oleh para kepala divisi.

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. Pelaksanaan dalam administrasi di lingkungan Kantor Wilayah
- b. Pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program dan pelaporan;
- c. Pertanggungjawaban pada bagian pengelolaan keuangan dan BMN
- d. Pelaksanaan pelayanan bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
- e. Pelaksanaan fasilitas perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
- f. Pengorganisasian pelaksanaan operasional Unit Pelayanan Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM bidang keimigrasian dan bidang masyarakat;
- g. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.

## E. TUGAS DAN FUNGSINYA

TUGAS	FUNGSI
DIVISI ADMINISTRASI Melaksanakan tugas sebagian Kantor Wilayah di bidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah;</li> <li>2. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan laporan;</li> <li>3. Pelaksanaan urusan kepegawaian, administrasi keuangan, dan perlengkapan, serta tata usaha dan rumah tangga; dan</li> <li>4. Pelaksanaan kehumasan pengelolaan teknologi informasi</li> </ol>

<p>Bagian Program dan Humas mempunyai tugas melaksanakan koordinasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran;</li> <li>2. Pengelolaan teknologi informasi, pengolahan data dan penyajian informasi,;</li> </ol>
<p>penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, pengolahan dan penyajian data, pemberian informasi dan komunikasi, protokoler, kehumasan, RB dan TI</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pelaksanaan protokoler, kehumasan, RB dan TI</li> <li>4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi</li> </ol>
<p>Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, administrasi keuangan dan BMN, tata usaha dan rumah tangga, serta melaksanakan koordinasi pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan tata usaha;</li> <li>2. Pengelolaan urusan kepegawaian;</li> <li>3. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;</li> <li>4. Pengelolaan urusan administrasi keuangan dan BMN</li> <li>5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga</li> </ol>
<p>DIVISI PEMASYARAKATAN Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasarakatan di wilayah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan pengendalian tugas teknis di bidang bimbingan pemasyarakatan, pengentasan anak, informasi dan komunikasi, keamanan, kesehatan, dan perawatan narapidana/tahanan, serta pengelolaan benda siataan dan barang rampasan negara;</li> <li>2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbingan pemasyarakatan, pengentasan anak, informasi dn komunikasi, keamanan, kesuhatan, dan perawatan narapidana/tahanan, serta pengelolaan benda siataan dan barang rampasan negara;</li> <li>3. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasarakatan;</li> <li>4. Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, saran dan prasaranan, serta administrasi keuangan di lingkungan unit pelaksana teknis pemasyarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi</li> </ol>

<p>Bidang Pembinaan, Bimbingan Pemasarakatan, Pengentasan Anak, Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbingan pemsarakatan, pengentasan anak, serta informasi dan komunikasi; dan</li> <li>2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbingan pemsarakatan, pengentasan anak, serta informasi dan komunikasi.</li> </ol>
<p>laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbingan pemsarakatan, pengentasan anak, serta informasi dan komunikasi</p>	
<p>Bidang Keamanan, Kesehatan, Perawatan Narapidana/Tahanan, dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang keamanan, kesehatan, dan perawatan narapidana/tahanan, serta pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang keamanan, kesehatan, dan perawatan narapidana/tahanan, serta pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara; dan</li> <li>2. Pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang keamanan, kesehatan, dan perawatan narapidana/tahanan, serta pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara.</li> </ol>
<p>DIVIS KEIMIGRASIAN Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang lalu lintas keimigrasian, ijin tinggal, dan status keimigrasian serta penindakan keimigrasian dan rumah detensi imigrasi;</li> <li>2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang lalu lintas keimigrasian, ijin tinggal, dan status keimigrasian serta penindakan keimigrasian dan rumah detensi imigrasi;</li> <li>3. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian; dan</li> <li>4. Pengorganisasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksanaan Teknis Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi</li> </ol>

<p>Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang lalu lintas keimigrasian dan tempat pemeriksaan imigrasi; dan</li> <li>2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang izin tinggal orang asing dan status kewarganegaraan</li> </ol>
<p>dokumen perlintasan, tempat pemeriksaan imigrasi, izin tinggal keimigrasian, dan status kewarganegaraan</p>	
<p>Bidang Intelijen, Penindakan, Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen keimigrasian, penindakan keimigrasian, serta informasi dan sarana komunikasi keimigrasian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen keimigrasian, penindakan keimigrasian, dan rumah detensi imigrasi; dan</li> <li>2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang informasi dan sarana komunikasi keimigrasian</li> </ol>

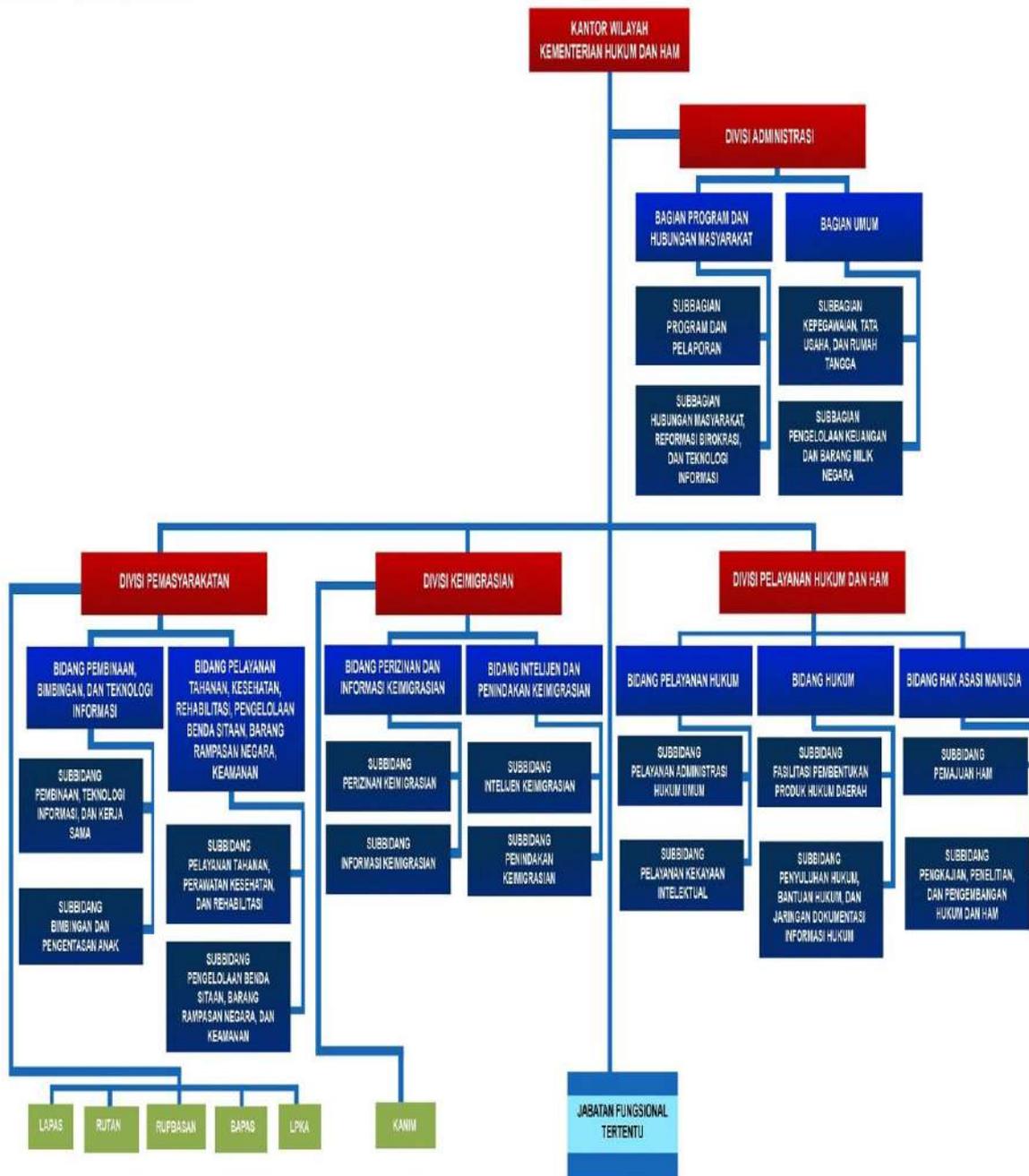
<p>DIVISI YANKUM Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal atau Badan terkait di wilayah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis pelayanan administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitas pembentukan produk hukum daerah; pengembangan Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Penyuluhan Hukum serta pejabat fungsional tertentu lainnya, pengkoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengkajian dan penelitian di bidang hukum dan hak asasi manusia, serta pemantauan pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan;</li> <li>2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penelitian di bidang hukum umum dan hak kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitas pembentukan produk hukum daerah, pengembangan Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Penyuluh Hukum serta pejabat fungsional tertentu lainnya, pengkoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengkajian dan penelitian di bidang hukum dan hak asasi manusia serta pemantauan pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan;</li> <li>3. Penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia</li> <li>4. Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan unit pelaksana teknis pelayanan hukum dan hak asasi manusia berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.</li> </ol>
<p>Bidang Pelayanan Hukum</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas</li> </ol>
<p>mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual, penyuluhan hukum dan bantuan hukum, serta pengembangan Penyuluh Hukum di wilayah</p>	<p>teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual, penyuluhan hukum dan bantuan hukum, serta pengembangan Penyuluh Hukum di wilayah;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual, penyuluhan hukum dan bantuan hukum, serta pengembangan Penyuluh Hukum di wilayah.</li> </ol>

Bidang Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan dokumentasi dan informasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, dan pengembangan Perancang Peraturan Perundang-undangan di wilayah, serta bimbingan teknis

1. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan dokumentasi dan informasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, dan pengembangan Perancang Peraturan Perundang-undangan di wilayah, serta bimbingan teknis; dan
2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan dokumentasi dan informasi hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, dan pengembangan Perancang Peraturan Perundang-undangan di wilayah, serta bimbingan teknis.

## F. SRUKTUR ORGANISASI

### STRUKTUR ORGANISASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY



## SATUAN KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pengertian Unit Pelaksana Teknis adalah Satuan Kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di setiap provinsi yang terdiri dari 4 (empat) Divisi serta 16 Unit Pelaksana Teknis, 15 (lima belas) UPT Pemasarakatan dan 1 (satu) UPT Imigrasi.

NO	UPT	ALAMAT
1	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA YOGYAKARTA	Jalan Tamansiswo Nomor 6 Yogyakarta 55111 Telp. (0274) 376126-375802 Fax (0274) 376126 Email : <a href="mailto:lapasjogja86@yahoo.com">lapasjogja86@yahoo.com</a>
2	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA	Jalan Kaliurang Km. 17 Yogyakarta Telp. (0274) 895433 Faksimili : (0274) 895422 Email : <a href="mailto:lapas_narkotika_jogja@yahoo.co.id">lapas_narkotika_jogja@yahoo.co.id</a>
3	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SLEMAN	Alamat Bedingin, Sumberadi, Mlati, Sleman 55288 Yogyakarta Telp/Fax : (0274) 867585 Email : <a href="mailto:lapas_sleman@yahoo.co.id">lapas_sleman@yahoo.co.id</a> Website : <a href="http://www.lapassleman.com">www.lapassleman.com</a>
4	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN YOGYAKARTA	Jalan Tamansiswo Nomor 6 Yogyakarta 55111 Email : <a href="mailto:lppjogja2016@yahoo.co.id">lppjogja2016@yahoo.co.id</a>
5	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK YOGYAKARTA	Jalan Mgr. Sugiyopranoto 35 Wonosari 55811 Telp./Fax : (0274) 391310 Email : <a href="mailto:lpkajogja@gmail.com">lpkajogja@gmail.com</a>
6	RUTAN KELAS IIA YOGYAKARTA	Jalan Taman Siswa No. 6A Yogyakarta Telp. (0274) 450247 Fax. (0274) 450248 Email : <a href="mailto:rutanjogja@gmail.com">rutanjogja@gmail.com</a>
7	RUTAN KELAS IIB BANTUL	Jalan Guwosari Pajangan Bantul Telp. (0274) 6462012 Faks : 6461011 Email : <a href="mailto:rutan.bantul@yahoo.co.id">rutan.bantul@yahoo.co.id</a>
8	RUTAN KELAS IIB WONOSARI	Jalan Mgr. Sugiyopranoto 35 Wonosari 55811 Telp./Fax : (0274) 391310 Email : <a href="http://www.wonosarirutan@ymail.com">www.wonosarirutan@ymail.com</a>
9	RUTAN KELAS IIB WATES	Jalan Suparman No. 03 Wates Kulon Progo 55611 Telp. (0274) 773051 Fax (0274) 773015 Email : <a href="mailto:rutanwates@yahoo.co.id">rutanwates@yahoo.co.id</a>
10	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I YOGYAKARTA	Jalan Trikora No. 1 Yogyakarta Telp. (0274) 374307 Fax (0274) 376324 Email : <a href="mailto:bapas_yogyakarta@yahoo.co.id">bapas_yogyakarta@yahoo.co.id</a>

<b>11</b>	BALAI PEMASYARAKATAN WONOSARI	Jalan Mgr. Sugiyopranoto No. 37 Wonosari 55811 Telp./Fax : (0274) 392929 Email : <a href="mailto:bapaswonosari@yahoo.com">bapaswonosari@yahoo.com</a>
<b>12</b>	RUPBASAN KELAS I YOGYAKARTA	Jalan Tamansiswa No. 8 Yogyakarta 55111 Telp. (0274) 419435 – 389170 Email : <a href="mailto:rupbasanyk@gmail.com">rupbasanyk@gmail.com</a> , <a href="mailto:rupbasanyk@yahoo.com">rupbasanyk@yahoo.com</a> Website : <a href="http://www.rupbasanjogja.com">www.rupbasanjogja.com</a>
<b>13</b>	RUPBASAN BANTUL	Jalan Srandakan Pandak Wijirejo Pandak Bantul 55761 Telp/Faksimile : (0274) 6462376 Email : <a href="mailto:rupbasanbantul@yahoo.com">rupbasanbantul@yahoo.com</a>
<b>14</b>	RUPBASAN WONOSARI	Jalan Ki Ageng Giring No. 10 Wonosari, Gunungkidul 55813 Telp./Fax : (0274) 394185 Email : <a href="mailto:rupbasan_wonosari@yahoo.com">rupbasan_wonosari@yahoo.com</a>
<b>15</b>	RUPBASAN WATES	Jalan Sugiman Gang Bispa No. 1 Wates Telp./Fax : (0274) 7496799, 775322 Email : <a href="mailto:rupbasanwates@gmail.com">rupbasanwates@gmail.com</a> , <a href="mailto:rupbasan.wates@yahoo.com">rupbasan.wates@yahoo.com</a>
<b>16</b>	KANTOR IMIGRASI	Jalan Solo Km 10 Yogyakarta. Po.Box. 10 YKAP Telp (0274) 487130, 489165 Email : <a href="mailto:kanim_yogyakarta@imigrasi.go.id">kanim_yogyakarta@imigrasi.go.id</a>

## BAB II

### PROGRAM KINERJA DAN KEGIATAN TAHUN 2024

Sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM, tentu sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY sebagai ujung tombak pencapaian sasaran strategis kementerian tersebut. Sasaran tersebut antara lain; Kesesuaian arah politik legislasi dengan arah pembangunan hukum nasional pada tahap pra legislasi, legislasi dan pasca legislasi; Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi hukum dan layanan jasa hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Efektifitas penyelenggaraan forum mahkumjakpol baik ditingkat nasional, propinsi maupun di kabupaten kota; Berkurangnya pelanggaran hukum di bidang keimigrasian dan HKI; Efektifitas peran *central authority* dalam mendukung kerjasama hukum timbal balik; Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelaksanaan sistem pemasyarakatan; Terwujudnya masyarakat yang sadar dan cerdas hukum dan memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin; Terimplimentasikannya kebijakan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM sesuai rencana aksi nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM); Manajemen organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang transparan dan akuntabel berdasarkan semangat reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM tersebut masih berisikan perencanaan global dengan penjabaran hanya sampai kepada program, oleh sebab itu diperlukan operasionalisasi dengan perencanaan yang lebih mikro sampai penjabaran terakhir pada kegiatan-kegiatan. Adapun Rencana Kinerja/ kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

#### A. Divisi Administrasi

1. Layanan BMN;
2. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik;
3. Layanan Protokoler;
4. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal;
5. Layanan Umum;
6. Layanan perkantoran;
7. Layanan Sarana Internal;
8. Layanan Manajemen SDM;
9. Layanan Perencanaan dan Penganggaran;

10. Layanan Pemantauan dan Evaluasi;
11. Layanan Manajemen Keuangan;
12. Layanan Reformasi Kinerja;
13. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan.

## **B. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM**

Direktorat Jendral AHU

1. Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah;
2. Penanganan Perkara terkait Produk Layanan AHU di Wilayah;
3. Pengawasan kenotariatan oleh Majelis Pengawas di Wilayah.

Direktorat Jendral HKI

1. Diseminasi Kekayaan Intelektual di Wilayah;
2. Edukasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah;
3. Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah.
4. Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah

Direktorat Jendral PP

- 1 Rekomendasi Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah;
- 2 Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah.

Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia

1. Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah;
2. Fasilitasi Pelaksanaan Strategi Nasional Bisnis dan HAM
3. Fasilitasi Aksi HAM di Wilayah;
4. Diseminasi dan Penguatan HAM di Wilayah;
5. Penilaian Kab/Kota Peduli HAM di Wilayah;
6. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang Berperspektif HAM di Wilayah.

Badan Pembinaan hukum Nasional

1. Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum di Daerah;
2. Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah;
3. Pengelolaan anggota JDIHN di wilayah;
4. Layanan penyuluhan hukum di Daerah;
5. Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
6. Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Wilayah;
7. Kegiatan Verifikasi dan Akreditasi OBH di Wilayah;
8. Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi;
9. Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi.

## Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

1. Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah;
2. Diseminasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah

### **C. Divisi Pemasyarakatan**

10. Pembinaan Layanan Pemasyarakatan di Wilayah;
11. Fasilitasi dan Pembinaan UPT Pemasyarakatan;
12. Operasi Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah;

### **D. Divisi Keimigrasian**

1. Operasi Intelijen Keimigrasian di Wilayah;
2. Operasi Mandiri di Wilayah;
3. Operasi Gabungan di Wilayah;
4. Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah;
5. Pembinaan dan Koordinasi Bidang Teknis Keimigrasian, Pembinaan, Pengendalian, Kerjasama dan Evaluasi Bidang Teknis Keimigrasian dan satuan Kerja Imigrasi
6. Pengawasan Orang Asing.

## PENCAPAIAN DAN PERMASALAHAN

Permasalahan atau hambatan, upaya dan saran pelaksanaan tugas dan fungsi/pelayanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY di antaranya:

## BAB III

### CAPAIAN KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja yang telah ditandatangani bersama. Selain itu, dalam tataran ideal, akuntabilitas tersebut sebagai pengukuran atas tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, rencana strategi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan sistem penyampaian pertanggungjawaban secara periodik.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Instansi vertikal sebagai pelaksana program dan tugas-tugas serta kebijakan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di daerah. Kegiatannya berupa Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dari Administrasi, Pelayanan Jasa Hukum dan HAM, Unit Pemasyarakatan serta Unit Keimigrasian di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu sebagai bentuk akuntabilitas, laporan pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi yang diberikan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY Menyusun Laporan Tahunan tahun 2024 berpedoman dengan peraturan yang berlaku. Laporan tahunan ini diharapkan dapat memberikan Gambaran maupun motivasi mengenai Tingkat pencapaian kinerja Kantor Wilayah DIY yang telah dilaksanakan sesuai indikator ataupun yang belum berhasil pada periode tahun tersebut.

#### A. Capaian Kinerja Orgnisasi

##### I. DIVISI ADMINISTRASI

###### *Pencapaian Kinerja Fungsi Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga*

Dalam pelaksanaan peningkatan kualitas dan fungsi kepegawaian, Subbag Kepegawaian, Tata Usaha dan rumah Tangga Kantor Wilayah DIY terdapat berbagai kegiatan untuk menopang Penatausahaan dan Pembinaan Kepegawaian terdapat 1.308 pegawai dengan berbagai kegiatan diantaranya:

No.	Kegiatan	Ket
1	Pelaksanaan Kegiatan Seleksi Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas Melalui Comet simpeg Kemenkumham TA. 2024	Terlaksana
2	Pengajian bulan Ramadhan “Pembinaan mental rohani pegawai “	Terlaksana
3	Penilaian Kompetensi Teknis bagi pegawai pada Divisi Administrasi	Terlaksana
4.	Uji Kompetensi dan Kelayakan untuk diusulkan menduduki jabatan administratif pada Kanwil Kemenkumham DIY	Terlaksana
5.	Orientasi CPNS Tahun 2024	Terlaksana
6.	Bimbingan Teknis Pemantauan Penilaian Kinerja Pegawai dan Sosialisasi <i>fitur</i> e-Kinerja pada Aplikasi SIMPEG	Terlaksana
7.	SKD CATAR Poltekip/Poltekim	Terlaksana
8.	Pembinaan SDM dengan Tema “Membangun Sinergi dan Integritas, Mewujudkan Penerimaan CASN	Terlaksana
9.	Pembekalan Purnabakti	Terlaksana
10.	Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	Terlaksana

***Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Komitmen Pelaksanaan Zona Integritas Tahun 2024***

Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan komitmen pelaksanaan zona integritas tahun 2024 di Lingkungan Kantor wilayah Kementerian hukum dan HAM D.I. Yogyakarta bertempat di Aula Kanwil DIY, penandatanganan PK ini bertujuan sebagai alat kendali kinerja secara berjenjang guna memastikan seluruh sasaran dan target dapat tercapai, disertai dengan peningkatan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur Sipil Negara. Dilanjutkan penandatanganan komitmen bersama untuk Menuju WBK dan WBBM Tahun 2024 dilakukan Kepala Kantor wilayah dengan kepala Divisi dan dilanjutkan penandatanganan Kepala Kantor Wilayah dengan Kepala unit Pelaksana Teknis.



Kegiatan di Aula Kanwil Kemenkumham DIY

**Capaian perjanjian kinerja yang terdapat pada Satuan Kerja diantaranya :**

**a. Rubrican Kelas II Bantul**

1	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%	$X = (A \times \text{Bobot } 80\%) + (B \times \text{Bobot } 20\%)$ A = Persentase rata rata pemenuhan Indikator Layanan Makanan B = Persentase rata rata pemenuhan kepemilikan sertifikat	Tidak ada laporan pengaduan masyarakat dan diartikan pelayanan telah sesuai dengan harapan masyarakat	90%	Tidak ada laporan pengaduan masyarakat dan diartikan pelayanan telah sesuai dengan harapan masyarakat	90%
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban secara tuntas	90%	$x = \frac{\text{Jumlah tahanan mendapatkan layanan kesehatan berkualitas}}{\text{total tahanan dan narapidana}} \times$	Telah dilaksanakan upaya antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban dengan pengawasan internal	90%	Telah dilaksanakan upaya antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban dengan pengawasan internal	90%
2	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di Wilayah Sesuai Standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	90%	$x = \frac{\text{Jumlah narapidana yang memperoleh predikat baik}}{\text{total narapidana yang mengikuti pembinaan kepribuditan}} \times$	Telah dilaksanakan pemeliharaan Basan Baran secara berkala engan bekerjasama dengan pihak ke-tiga	90%	Telah dilaksanakan pemeliharaan Basan Baran secara berkala engan bekerjasama dengan pihak ke-tiga	90%
		Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	90%	$x = \frac{\text{Jumlah narapidana yang mendapatkan remisi tahun berjalan}}{\text{Jumlah narapidana yang diusulkan mendapatkan remisi}} \times$	Pengeluaran Basan Baran berdasarkan surat pengeluaran/pengambilan Basan Baran dari instansi penitip	90%	Pengeluaran Basan Baran berdasarkan surat pengeluaran/pengambilan Basan Baran dari instansi penitip	90%
3	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan	100%	$x = \frac{\text{Jumlah penyelesaian pengaduan sesuai standar}}{\text{Jumlah pengaduan yang diterima}} \times 100\%$	Telah dilaksanakan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kepada setiap pengguna layanan dengan hasil yang sangat memuaskan	100%	Telah dilaksanakan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kepada setiap pengguna layanan dengan hasil yang sangat memuaskan	100%
		Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks	$x = \frac{\text{Jumlah kasus yang gagal/tidak terimal oleh petugas}}{\text{Jumlah kejadian tindak pidana yang ditaklukan wpt}} \times 100\%$	Telah dilaksanakan survei kepuasan unit secara internal pegawai dengan hasil sangat memuaskan	3,1 Indeks	Telah dilaksanakan survei kepuasan unit secara internal pegawai dengan hasil sangat memuaskan	3,1 Indeks

b. Rutan Kelas IIB Bantul

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
-1	-2	-3	-4	-5
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak/Anak Binaan sesuai dengan standar	85%	75%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak/Anak Binaan mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95%	76%
		3. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90%	86%
		4. Persentase tahanan/ narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana/anak/anak binaan berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%	76%
		6. Persentase tahanan/ narapidana/anak /anak binaan yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS dan TB	90%	78%
		7. Persentase peserta rehabilitasi (pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika) yang kualitas hidupnya meningkat	8%	6%
		8. Progress perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LPKA	25%	20%
2	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana	1. Persentase narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian	75%	69%
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100%	89%
		3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	100%	86%
		4. Persentase narapidana yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	75%	67%
2	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%	80%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	90%	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak/ Anak Binaan pelaku gangguan Keamanan dan Ketertiban	90%	80%
		4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban secara tuntas	90%	80%
4	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai Standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang <i>overstaying</i>	5%	4%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Kepribadian	90%	70%
		3. persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	100%	90%
5	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Masyarakat	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Masyarakat	100%	70%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Masyarakat terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks	2,9

c. RutanKelasIIBWates

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi s.d Triwulan III (B09) Tahun 2024	Capaian	Keterangan
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	85%	100%	117%	Tercapai sesuai target Triwulanan
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan	95%	100%	105%	Tercapai sesuai target Triwulanan

		(preventif) secara berkualitas				
		3. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90%	nihil	Nihil	Tercapai sesuai target Triwulanan
		4. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%	100%	111%	Tercapai sesuai target Triwulanan
		5. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%	nihil	111%	Tercapai sesuai target Triwulanan
		6. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	90%	100%	111%	Tercapai sesuai target Triwulanan
		7. Progress perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LPKA	25%	90%	360%	Tercapai sesuai target Triwulanan
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan	1. Persentase narapidana yang memperoleh	75%	100 %	133%	Tercapai sesuai

	Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana	predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian				target Triwulanan
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100%	100%	100%	Tercapai sesuai target Triwulanan
		3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	100%	100%	100%	Tercapai sesuai target Triwulanan
		4. Persentase narapidana yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	75%	100%	133%	Tercapai sesuai target Triwulanan
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%	100%	111%	Tercapai sesuai target Triwulanan
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	90%	100%	111%	Tercapai sesuai target Triwulanan
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapida	90%	100%	111%	Tercapai sesuai target Triwulanan

		na/Anak pelaku gangguan kamtib				
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	90%	100%	111%	Tercapai sesuai target Triwulanan
4.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	100%	100%	100%	Tercapai sesuai target Triwulanan
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	100%	100%	100%	Tercapai sesuai target Triwulanan
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	100%	100%	100%	Tercapai sesuai target Triwulanan
5.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan	100%	75%	75%	Tercapai sesuai target Triwulanan
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks	3.99		Tercapai

d. Rupbasan Kelas II Wates

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi s.d Triwulan III Tahun 2024	Keterangan
1	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Keterlibatan di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%	100%	Tercapai
		2. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Keamanan dan Keterlibatan secara tuntas.	90%	100%	Tercapai
2	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya.	90%	100%	Tercapai
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkecuan hukum tetap	90%	100%	Tercapai
3	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan.	100%	100%	Tercapai
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan	3,1 Indeks	3.1 Indeks	Tercapai

e. Lapas Kelas IIB Sleman

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi s.d. Triwulan III Tahun 2024	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/ Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana sesuai dengan standar	85%	100%	Semua tahanan/ narapidana mendapatkan layanan makanan <b>sesuai standar, hygiene dan jaminan halal</b>
		2. Persentase tahanan/narapidana mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95%	100%	Semua tahanan/ narapidana mendapatkan layanan kesehatan <b>secara berkualitas</b>
		3. Persentase tahanan/narapidana yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90%	100%	Tidak terdapat tahanan/ narapidana yang mengalami gangguan mental
		4. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan	90%	100%	Semua tahanan/ narapidana lansia mendapatkan layanan <b>kesehatan sesuai standar</b> seperti <i>extra feeding</i> melalui

		kesehatan sesuai standar			program inovasi <b>Posyandu Lansia</b>
		5. Persentase tahanan/narapidana berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%	100%	Tidak terdapat tahanan/narapidana berkebutuhan khusus, namun Lapas Sleman telah <b>menyediakan sarana dan prasarana pendukung</b> untuk disabilitas
		6. Persentase tahanan/narapidana/ anak/ anak binaan yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS dan TB	90%	100%	a. Dilakukan <b>Survei Batuk</b> pada tanggal 17 September 2024 terhadap 313 orang tahanan/narapidana. Didapatkan 18 orang tahanan/narapidana diindikasikan TBC. Dilindaklanjuti dengan <b>Tes Cepat Mokuler (TCM)</b> dengan hasil <b>negatif</b> berpenyakit TBC; b. Terdapat 2 (dua) orang narapidana penderita HIV-AIDS tertangani dengan <b>rutin diberikan obat ARV</b> untuk perawatan kesehatannya
		7. Progress perizinan klinik pada Lapas	25%	100%	Klinik "O" Medika Lapas Sleman <b>telah berizin</b> , SK Nomor : 1702230059107 tanggal 2 Februari 2024
2	Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh predikat baik pada variable pembinaan kepribadian	75%	50,63%	Bulan Juli dan Agustus masih terdapat masing-masing 5 narapidana <b>predikat cukup</b> dalam pembinaan kepribadian.
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100%	100%	Narapidana yang memenuhi persyaratan administratif dan substantif <b>mendapatkan hak remisi</b>
		3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak	100%	100%	Narapidana yang memenuhi persyaratan administratif dan

		integrasi			substansif <b>mendapatkan hak integrasi</b>
		4. Persentase narapidana yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	75%	100%	Narapidana telah mendapatkan intervensi pembinaan sehingga berperilaku <b>sadar, patuh dan disiplin</b>
		5. Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	34%	32,91%	Sebanyak <b>60 orang narapidana</b> mendapatkan pendidikan dan pelatihan vokasi s.d. triwulan III
		6. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	77%	74,13%	Narapidana bekerja produktif di Subsidi <b>Kegiatan Kerja</b> maupun ditetapkan sebagai tamping
3	Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%	100%	Tidak ada pengaduan ( <b>nihil</b> )
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	90%	100%	Gangguan Kamtib dapat dicegah dengan melakukan tugas penjagaan, pengawalan, penggeledahan, inspeksi, kontrol, pengawasan komunikasi, pengendalian lingkungan, penguncian, penempatan dalam rangka pengamanan, investigasi dan reka ulang, tindakan pengamanan.
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana pelaku gangguan kamtib	90%	100%	Dilakukan <b>upaya proemtif</b> dengan memberikan arahan aturan/PUD/tata tertib, <b>upaya preventif</b> dengan melakukan upaya intelijen dan pencegahan serta <b>upaya represif</b> dengan melakukan penegakkan keamanan dan ketertiban. Terdapat 7 kasus pelanggaran tata tertib pada triwulan III, pelaku ditindak sesuai SOP dan diberikan intervensi pembinaan untuk

					lebih patuh dan disiplin.
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	90%	100%	Pasca gangguan Kamtib dilakukan upaya pemulihan secara tuntas baik <b>rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi</b>
4	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan	1. Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	100%	75%	Rencana Aksi reformasi birokrasi telah dilaksanakan <b>sesuai dengan target</b> sampai dengan triwulan III
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretarian	3,1	3,92	Hasil survei IKM pada aplikasi Survei BSK s.d.Triwulan III dengan <b>jumlah responden 425 orang</b>

f. Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta

LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA							
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak/Anak Binaan sesuai dengan standar	85%	$X = (A \times \text{Bobot } 80\%) + (B \times \text{Bobot } 20\%)$ A = Persentase rata rata pemenuhan Indikator Layanan Makanan B = Persentase rata rata pemenuhan kepemilikan sertifikat	Telah dilaksanakan pemenuhan layanan makanan bagi tahanan dan narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta seluruhnya 623 orang mendapatkan layanan makanan yang layak sesuai standar	Telah dilaksanakan pemenuhan layanan makanan bagi tahanan dan narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta seluruhnya 636 orang mendapatkan layanan makanan yang layak sesuai standar	100%
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak/Anak Binaan mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95%	$x = \frac{\text{jumlah tahanan mendapatkan layanan kesehatan berkualitas}}{\text{total tahanan dan narapidana}} \times 100\%$	Kegiatan layanan kesehatan kepada WBP telah dilaksanakan setiap minggunya, dengan inovasi ketuk pintu mendatangi setiap kamar WBP untuk pengecekan kondisi WBP dilakukan oleh perawat dan Dokter setiap pagi hari, selain itu penyuluhan penyuluhan kesehatan oleh Dokter dan Perawat telah dilaksanakan, berupa penyuluhan terkait Penyakit menular seksual dan bahaya narkoba	Kegiatan layanan kesehatan kepada WBP telah dilaksanakan setiap minggunya, dengan inovasi ketuk pintu mendatangi setiap kamar WBP untuk pengecekan kondisi WBP dilakukan oleh perawat dan Dokter setiap pagi hari, selain itu penyuluhan penyuluhan kesehatan oleh Dokter dan Perawat telah dilaksanakan, berupa penyuluhan terkait Penyakit menular seksual dan bahaya narkoba	100%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90%	$x = \frac{\text{tahanan yang dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut}}{\text{total tahanan yang terindikasi gangguan mental}} \times 100\%$	Belum pernah menerima tahanan dan narapidana yang mengalami gangguan mental	Belum pernah menerima tahanan dan narapidana yang mengalami gangguan mental	100%
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%	$x = \frac{\text{jumlah tahanan lansia yang mendapat layanan kesehatan}}{\text{jumlah tahanan lansia}} \times 100\%$	Terdapat 1 (satu) narapidana lansia (kelompok rentan), mendapatkan layanan kesehatan khusus setiap hari oleh poliklinik	Terdapat 1 (satu) narapidana lansia (kelompok rentan), mendapatkan layanan kesehatan khusus setiap hari oleh poliklinik	100%
		Persentase tahanan/narapidana/ anak/ anak binaan berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%	$x = \frac{\text{jumlah tahanan berkebutuhan khusus mendapat layanan kes}}{\text{jumlah tahanan berkebutuhan khusus}} \times 100\%$	Belum pernah mendapatkan tahanan dan narapidana berkebutuhan khusus.	Belum pernah mendapatkan tahanan dan narapidana berkebutuhan khusus.	100%
		Persentase tahanan/narapidana/ anak/ anak binaan yang mendapatkan penanganan HIV- AIDS dan TB	90%	$x = \frac{\text{jumlah tahanan mendapatkan penanganan HIV- AIDS dan TB}}{\text{jumlah tahanan yang terdiagnosa HIV AIDS dan TB}} \times 100\%$	Telah dilaksanakan penanganan dengan baik pada tahanan yang mengidap HIV sejumlah 0 orang dan TB sejumlah 0 orang.	Telah dilaksanakan penanganan dengan baik pada tahanan yang mengidap HIV sejumlah 0 orang dan TB sejumlah 0 orang.	100%
		Persentase peserta rehabilitasi (pecandu/penyalah guna/korban penyalahgunaan narkotika) yang kualitas hidupnya meningkat	8%	$x = \frac{\text{jumlah setelah skor kualitas hidup peserta rehab bulan 3 dengan bulan 0}}{\text{jumlah tahanan peserta rehab diukur indeks kualitas hidupnya sampai bulan 3}} \times 100\%$	Telah dilaksanakan Program rehabilitasi sosial tahanan/ narapidana pecandu narkoba sejumlah 150 orang dari target yang ditetapkan hanya 130 orang dimulai pada Bulan Februari 2024 sampai Agustus 2024	Telah dilaksanakan Program rehabilitasi sosial tahanan/ narapidana pecandu narkoba sejumlah 150 orang dari target yang ditetapkan hanya 130 orang dimulai pada Bulan Februari 2024 sampai Agustus 2024	100%
		Progress perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LPKA	25%	$x = \frac{\sum \text{Progress perizinan klinik yang terlaksana}}{\sum \text{Total tahap atau langkah perizinan klinik}} \times 100\%$	Klinik Pratama Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta Telah Mendapatkan Predikat Paripurna dari Lembaga Akreditasi Fasyankes Seluruh Indonesia (LAKESI)	Klinik Pratama Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta Telah Mendapatkan Predikat Paripurna dari Lembaga Akreditasi Fasyankes Seluruh Indonesia (LAKESI)	100%

2	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana	Persentase narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian	75%	$x = \frac{\text{Jumlah narapidana yang memperoleh predikat baik}}{\text{total narapidana yang mengikuti pembinaan kepribadian}} \times 100\%$	Telah dilaksanakan program pembinaan kepribadian sesuai dengan keyakinan warga binaan. Terdapat 613 warga binaan yang memperoleh predikat baik dari total 623 wbp. 10 orang diantaranya melanggar tata tertib Lapas.	98%	Telah dilaksanakan program pembinaan kepribadian sesuai dengan keyakinan warga binaan. Terdapat 631 warga binaan yang memperoleh predikat baik dari total 636 wbp. 5 orang diantaranya melanggar tata tertib rutan.	99%
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100%	$x = \frac{\text{Jumlah narapidana yang mendapat hak remisi tahun berjalan}}{\text{jumlah narapidana yang diusulkan mendapat remisi}} \times 100\%$	Januari-Maret tidak ada usulan remisi karena tidak ada hari besar keagamaan	100%	Telah diusulkan 402 narapidana untuk mendapatkan hak remisi. Sebanyak 402 narapidana mendapatkan hak remisi hari raya idul Fitri Tahun 2024 dan 1 Narapidana mendapat hak remisi hari raya waisak	100%
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	100%	$x = \frac{\text{jumlah narapidana yang mendapat hak integrasi}}{\text{jumlah narapidana yang diusulkan hak integrasi}} \times 100\%$	Telah diusulkan 40 narapidana untuk mendapatkan hak integrasi dan seluruhnya telah mendapatkan hak integrasi PB.	100%	Telah diusulkan 60 narapidana untuk mendapatkan hak integrasi dan seluruhnya telah mendapatkan hak integrasi PB.	100%
		Persentase narapidana yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	75%	$x = \frac{\text{jumlah narapidana yang berpredikat sadar patuh disiplin}}{\text{total narapidana yang mengikuti pembinaan kepribadian}} \times 100\%$	Sebanyak 10 narapidana melanggar tata tertib menyadari kesalahan yang dilakukan selama di dalam lapas dan menjadi berperilaku lebih baik setelah mendapatkan pembinaan	100%	Sebanyak 5 narapidana melanggar tata tertib menyadari kesalahan yang dilakukan selama di dalam Lapas dan menjadi berperilaku lebih baik setelah mendapatkan pembinaan	100%
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%	$x = \frac{\text{jumlah penyelesaian pengaduan sesuai standar}}{\text{jumlah pengaduan yang diterima}} \times 100\%$	Adanya pengaduan dari warga binaan terkait perkelahian, pemukulan antar wbp ditindaklanjuti proses BAP dan Pengusulan penjatuhan Hukdis	100%	Adanya pengaduan dari wbp terkait rencana penyelundupan obat terlarang kepada wbp, ditindaklanjuti proses BAP dan Pengusulan penjatuhan Hukdis	100%
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	90%	$x = \frac{\text{jumlah kasus pengulangan tindak kriminal oleh petugas}}{\text{jumlah kejadian tindak pidana yang dilakukan WBP}} \times 100\%$	Adanya rencana penyelundupan obat terlarang yang berhasil digagalkan oleh petugas sebanyak 2 kasus	100%	Adanya rencana penyelundupan obat terlarang yang berhasil digagalkan oleh petugas sebanyak 3 kasus	100%
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/Anak/ Anak Binaan pelaku gangguan Keamanan dan Ketertiban	90%	$x = \frac{\text{jumlah tahanan yang patuh dan disiplin tatib}}{\text{jumlah tahanan pelaku gangguan kamtib}} \times 100\%$	Jumlah tahanan dan narapidana sampai periode Bulan Maret 2024 berjumlah 623 orang, 613 orang menunjukkan patuh dan disiplin terhadap tata tertib rutan dan 10 orang melanggar tata tertib Lapas ( pemukulan : 5 Orang, Peredaran : 2 Orang, Penyelundupan : 3 Orang)	102%	Jumlah tahanan dan narapidana sampai periode Bulan Juni 2024 berjumlah 636orang, 631 orang menunjukkan patuh dan disiplin terhadap tata tertib Lapas dan 5 orang melanggar tata tertib Lapas.	126%
	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban secara tuntas	90%	$x = \frac{\text{jumlah pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib}}{\text{jumlah gangguan kamtib yang tertangani}} \times 100\%$	Sudah dilakukan pembinaan sikap dan perilaku melakukan penempatan kamar hunian berdasarkan tingkat resiko pasc melakukan gangguan kamtib	100%	Sudah dilakukan pembinaan sikap dan perilaku melakukan penempatan kamar hunian berdasarkan tingkat resiko pasc melakukan gangguan kamtib	100%	

4	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai Standar	Persentase tahanan yang <i>overstaying</i>	5%	$x = \frac{\sum \text{jumlah tahanan yang tidak overstaying}}{\sum \text{Total jumlah tahanan}} \times 100\%$	Tidak ada tahanan yang <i>overstaying</i>	100%	Tidak ada tahanan yang <i>overstaying</i>	100%
		Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Kepribadian	90%	$x = \frac{\sum \text{jumlah tahanan memperoleh layanan kepribadian}}{\sum \text{Total jumlah tahanan di rutan}} \times 100\%$	Seluruh tahanan/narapidana mendapatkan layanan kepribadian sesuai dengan agama yang dianut	100%	Seluruh tahanan/narapidana mendapatkan layanan kepribadian sesuai dengan agama yang dianut	100%
		Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	100%	$x = \frac{\sum \text{jumlah tahanan penerima penyuluhan hukum}}{\sum \text{jumlah tahanan pemohon bantuan hukum}} \times 100\%$	Seluruh tahanan/narapidana mendapatkan layanan penyuluhan hukum baik yang diselenggarakan oleh kanwil kementerian DIY ataupun LBH swasta, Telah dilaksanakan penyuluhan hukum sebanyak 6 Kali Kepada Warga Binaan Pemasarakatan	100%	Seluruh tahanan/narapidana mendapatkan layanan penyuluhan hukum baik yang diselenggarakan oleh kanwil kementerian DIY ataupun LBH swasta, Telah dilaksanakan kegiatan penyuluhan hukum sebanyak 15 Kali kepada Warga Binaan Pemasarakatan	100%
5	Meningkatnya Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan	100%	$\frac{\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB}}{\text{Rencana aksi RB terkait UPT PAS yang terlaksana}} \times 100\%$	Telah dilakukan movev rencana aksi Reformasi Birokrasi Bulan Januari - Maret 2024. Secara keseluruhan, penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta pada Triwulan I (Pemenuhan B03) Tahun 2024 terilai baik	100%	Telah dilakukan movev rencana aksi Reformasi Birokrasi Bulan April - Juni 2024. Secara keseluruhan, penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta pada Triwulan II (Pemenuhan B06) Tahun 2024 terilai baik	100%
		Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks		Telah dilakukan survei terhadap pengunjung Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta periode Jan - Maret 2024. Responden dipilih secara random sampling/ acak terhadap 100 orang pengunjung dengan hasil indeks 3.99 (sangat baik)	3.99	Telah dilakukan survei terhadap pengunjung Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta periode April- Juni 2024. Responden dipilih secara random sampling/ acak terhadap 100 orang pengunjung dengan hasil indeks 3.99 (sangat baik)	3.99

g. Kanim Kelas I TPI Yogyakarta

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Rumus Perhitungan	Capaian TW I		Capaian TW II	
					Capaian	Persentase	Capaian	Persentase
1	Ditotalnya Pengisian Hukum Kamigrasi di Wilayah	Persentase Pengisian Hukum Pro Yustisi di Wilayah yang ditangani	90%	$x = \frac{\text{Jumlah total pengisian hukum administrasi yang ditangani di wilayah}}{\text{Total pengisian hukum administrasi yang ditangani di wilayah}} \times 100\%$	Belum dilaksanakan kegiatan pengisian hukum pro yustisi dikarenakan belum ada pelaksanaan dari Warga Negara Asing (WNA) yang berada di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta yang melakukan pelaksanaan tindak pidana	0%	Belum dilaksanakan kegiatan pengisian hukum pro yustisi dikarenakan belum ada pelaksanaan dari Warga Negara Asing (WNA) yang berada di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta yang melakukan pelaksanaan tindak pidana	0%
		Persentase Tindakan Administratif Kamigrasi di Wilayah yang ditangani	90%	$x = \frac{\text{Jumlah kasus pelaksanaan tindakan administratif kamigrasi yang ditangani di wilayah}}{\text{Total kasus pelaksanaan administratif kamigrasi yang ditangani di wilayah}} \times 100\%$	Telah dilaksanakan kegiatan tindakan administratif kamigrasi pada Triwulan I sebanyak 3 kegiatan dengan rincian 2 kegiatan deportasi tanpa pengalihan, dan 1 kegiatan tindakan administratif kamigrasi berupa pengisian biaya balun pelanggaran overstay yang semuanya dapat terselesaikan	100%	Telah dilaksanakan kegiatan tindakan administratif kamigrasi pada Triwulan I sebanyak 4 kegiatan dengan rincian 3 kegiatan deportasi tanpa pengalihan, dan 1 kegiatan tindakan administratif kamigrasi berupa pengisian biaya balun pelanggaran overstay yang semuanya dapat terselesaikan	100%
2	Meningkatnya Layanan Kamigrasi di Wilayah	Rasio Layanan Kamigrasi di Wilayah yang disosialisasikan terhadap total pemohonan layanan Kamigrasi di wilayah yang ditangani	90%	Formula mengikut ketentuan pada Peraturan PB no. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Telah dilaksanakan kegiatan layanan pemberian paspor sebanyak 10.483 dokumen dan layanan pemberian visa dari dan tingkat sebanyak 581 dokumen, kegiatan perijinan keberangkatan Luar Negeri (LN) WNI 28.756, WNA 16.676, kegiatan perijinan keberangkatan Luar Negeri (LN) WNI 20.432 WNA 17.065	97,92%	Telah dilaksanakan kegiatan layanan pemberian paspor sebanyak 14.483 dokumen dan layanan pemberian visa dari dan tingkat sebanyak 445 dokumen, kegiatan perijinan keberangkatan Luar Negeri (LN) WNI 26.461, WNA 18.519, kegiatan perijinan keberangkatan Luar Negeri (LN) WNI 27.215 WNA 23.249	96,72%
3	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Persentase pelaksanaan rencana aksi RB di lingkup UPT Imigrasi	100%	$\frac{\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB}}{\text{Rencana aksi RB terkait UPT Imigrasi yang terlaksana}} \times 100\%$	Telah dilaksanakan kegiatan movev rencana aksi Reformasi Birokrasi Bulan Januari-Maret 2024. Secara keseluruhan, penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta pada Triwulan I (Pemenuhan B03) Tahun 2024 terilai baik	100%	Telah dilaksanakan kegiatan movev rencana aksi Reformasi Birokrasi Bulan April-Juni 2024. Secara keseluruhan, penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta pada Triwulan II (Pemenuhan B06) Tahun 2024 terilai baik	100%
		Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kasekretariatan	3,1 (Indeks)	Cara manual menggunakan MS. Excel 1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kemudian tentukan bobot setiap pertanyaan harus sama dengan 100% 2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : $\text{Skala Muti (n)} \times \text{Jumlah respon yang menjawab 'sangat baik' (1)}$ Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh respon, jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan (Z1) 3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : $\frac{\sum R_i}{\sum f_i}$ (Z2) 4. Hitung Tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (x) dengan rumus : $(x) = \frac{\text{enje (bn)}}{n}$ 5. Jumlahkan Tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan Cara mengitung dapat juga menggunakan software Statistika seperti SPSS – jadi petunjuk aplikasi dengan perintah perhitungan setiap pertanyaan seperti Cara Manual menggunakan Ms. Excel	Telah dilakukan survei integritas internal terhadap pegawai di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta tentang kepuasan pada layanan kasekretariatan dengan capaian sebesar 17,32 (Indeks)	99,02%	Telah dilakukan survei integritas internal terhadap pegawai di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta tentang kepuasan pada layanan kasekretariatan dengan capaian sebesar 17,48 (Indeks)	99,80%

### ***Pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I***

Pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024, dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2024 bertempat di Aula kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta. Pelaksanaan ini diikuti oleh Pegawai Jajaran Kanwil kemenkumham DIY. Tujuan diadakan ujian dinas tersebut nantinya dapat dilakukan untuk penyesuaian Ijazah dalam penyetaraan tingkat kenaikan golongan sesuai masa kerja dan tingkat golongan pada masing-masing pegawai.



Kegiatan Ujian Dinas Pegawai Jajaran Kanwil kemenkumham DIY

### ***Pengajian Bulan Suci Ramadhan Tahun 2024 kanwil kemenkumham DIY***

Pengajian dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta diikuti Aparatur Sipil Negara di Jajaran lingkungan Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembinaan mental Rohani pegawai “kita jadikan Ramadhan sebagai momentum mempererat silaturahmi, meningkatkan ketaqwaan dan kesabaran, serta mensyukuri nikmat dengan saling berbagi.



Pengajian pembinaan mental rohani pegawai pada bulan ramadhan

#### ***Pelaksanaan Penilaian Kompetensi Teknis bagi Pegawai divisi Administrasi***

Pelaksanaan uji kompetensi dan kelayakan di Jajaran Kantor Wilayah ini bertujuan untuk menjaring atau memenuhi kriteria pegawai disiplin, bertanggungjawab, memiliki kapasitas yang lebih dan berkompeten sehingga dapat diusulkan untuk menduduki jabatan administrasi pada Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta



Kegiatan Uji Kompetensi dan Kelayakan Jajaran Kanwil Kemenkumham DIY

## ***Penerimaan Seleksi CPNS Kanwil Kemenkumham DIY Tahun 2024***

Seleksi penerimaan CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024, dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2024 bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta, Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta, RS Bhayangkara dan Batalyon A Pelopor Brimob Polda DIY. Adapun tahapan seleksi penerimaan CPNS adalah: Verifikasi Berkas PO BOX, Verifikasi Berkas Asli dan Pengukuran Tinggi Badan, CAT SKD, CAT SKB, Kesamaptaan, Wawancara dan Pemberkasan.

### ***Kualifikasi Seleksi CPNS Tahun 2024 Kanwil kemenkumham D.I. yogyakarta***

- a. Terdapat sejumlah peserta yang lolos seleksi administrasi CPNS Kemenkumham 2024 adalah 441.008 orang. Rincian peserta yang lolos seleksi administrasi CPNS Kemenkumham 2024 :
  1. Jumlah peserta yang akan mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Kemenkumham DIY tahun 2024 adalah **15.087** peserta.
  2. Jumlah pelamar CPNS yang akan mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CAT Kemenkumham DIY tahun 2024 adalah **1.264** peserta.
  3. Jumlah peserta yang akan mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Kemenkumham DIY tahun 2024 adalah **721** peserta.
  
- b. Kanwil Kemenkumham DIY secara resmi menyelesaikan rangkaian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024;
  1. Pelaksanaan SKD tahun ini berlangsung selama **12 hari** dengan total **45 sesi ujian**
  2. Dengan mengakomodasi seluruh peserta, setiap harinya, sekitar **1.020 peserta**

Dengan jumlah peserta yang besar, Kanwil Kemenkumham DIY telah berhasil memastikan bahwa pelaksanaan SKD dapat berjalan dengan tertib, efektif, dan mematuhi protokol yang ketat. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DIY menyampaikan apresiasi tinggi kepada panitia seleksi yang bekerja keras selama pelaksanaan SKD ini, mengapresiasi seluruh panitia yang telah bekerja keras dan solid, memastikan setiap aspek pelaksanaan SKD berjalan lancar tanpa kendala. Keberhasilan pelaksanaan SKD CPNS Kemenkumham DIY tahun ini menjadi bukti kesiapan dalam melaksanakan seleksi CPNS yang transparan, akuntabel, dan memenuhi standar mutu.



Tes SKD CPNS Tahun 2024 di Merapi Merbabu Hotel

## ***Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Kesamptaan CPNS Kemenkumham Tahun 2024***

Penilaian Seleksi Kompetensi Bidang kesamptaan bagi peserta CPNS Formasi SLTA dan Non SLTA pada Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta yang diselenggarakan di Batalyon A Pelopor Brimobda Polda DIY. roses seleksi ini merupakan tahap lanjutan bagi para pelamar yang sebelumnya telah lolos seleksi psikotes dan kesehatan



SKD Kesamptaan CPNS Tahun 2024

### ***SKB Wawancara dan Ketrampilan CPNS Tahun 2024***

Penilaian kesamaptan praktik kerja dan wawancara dan ketrampilan CPNS pada Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta yang diselenggarakan di Aula Kantor Wilayah DIY



Peserta Tes Wawancara dan Ketrampilan

### ***Kanwil Kemenkumham DIY menyelenggarakan orientasi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).***

Materi orientasi yang diberikan pada peserta orientasi meliputi keterampilan baris berbaris dan penanganan huru hara, seluruh kegiatan orientasi telah dirancang untuk membentuk karakter orang menjadi seorang insan Pengayoman, Kegiatan diikuti dengan penuh semangat. Ilmu-ilmu yang diberikan oleh tim Brimob supaya dapat diserap dengan baik untuk bekal bertugas di Lapas/Rutan”

CPNS yang mengikuti orientasi sebanyak 20 orang, seluruhnya ditempatkan pada satuan kerja Lapas/Rutan di wilayah DIY. Para tunas Pengayoman ini diharapkan akan memberikan warna baru di satuan kerjanya.



Kegiatan Orientasi CPNS



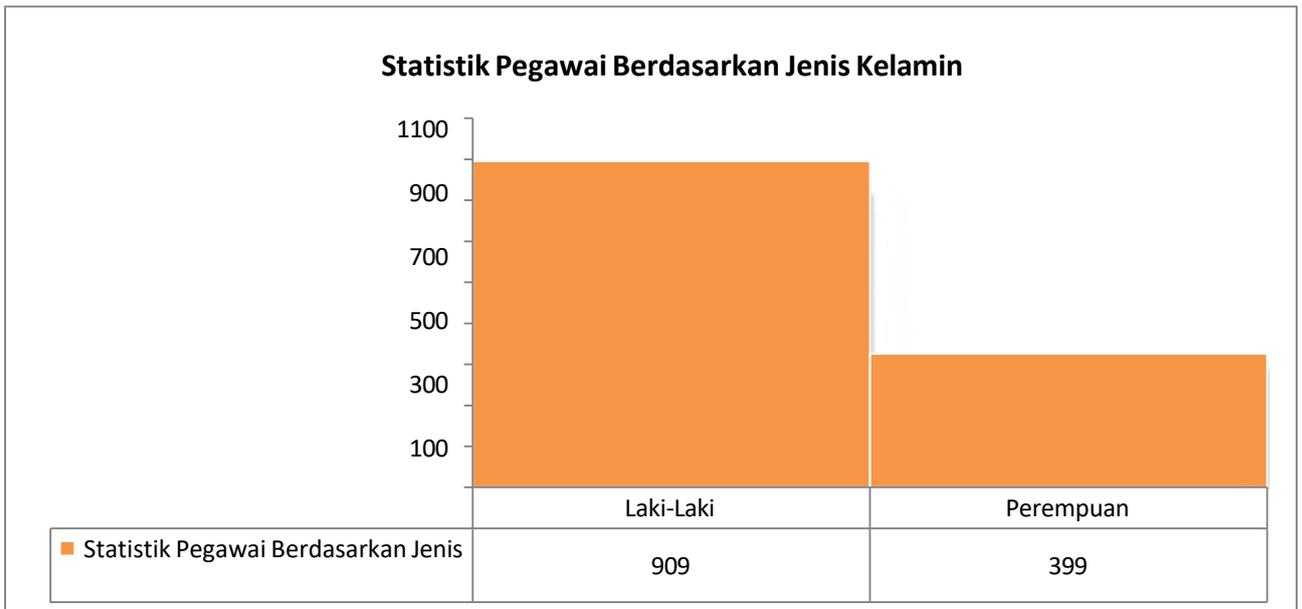
Peserta SKD Poltekip dan Poltekim

## Data Pegawai Jajaran Kanwil Kemenkumham DIY Tahun 2024

Adapun data sumber dari kepegawaian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut :

### 1. Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	SATKER	PEGAWAI LAKI-LAKI	PEGAWAI PEREMPUAN	JUMALH PEGAWAI
1	2	3	4	5
1.	Kanwil	116	105	221
2.	UPT	793	294	1.087
	Jumlah	<b>909</b>	<b>399</b>	<b>1.308</b>



### 2. Jumlah Jabatan Pegawai Pada Jajaran Kantor Wilayah

NO	SATKER	JABATAN	JUMALH
1	2	3	4
1.	Struktural	162	162
2.	JFT	320	320
3.	JFU	826	826
	Jumlah	<b>1.308</b>	

### 3. Jumlah Jabatan Fungsional Pada Jajaran Kantor Wilayah

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
1.	Perancang Peraturan perundang-undangan Pertama	7
2.	Perancang Peraturan perundang-undangan Muda	18
3.	Perancang Peraturan perundang-undangan Madya	2
4.	Penyuluh Hukum Pertama	1
5.	Penyuluh Hukum Muda	8
6.	Penyuluh Hukum Madya	13
7.	Analisis Hukum Pertama	4
8.	Analisis Hukum Muda	4
9.	Analisis Hukum Madya	3
10.	Analisis Kekayaan Intelektual Pertama	1
11.	Analisis Kekayaan Intelektual Muda	2
12.	Analisis Kekayaan Intelektual Madya	1
13.	Analisis Keimigrasian Madya	2
NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
14.	Analisis Keimigrasian Muda	2
15.	Analisis SDM Aparatur Pertama	2
16.	Analisis SDM Aparatur Muda	7
17.	Analisis SDM Aparatur Madya	1
18.	Arsiparis Ahli Pertama	5
19.	Arsiparis Ahli Muda	3
20.	Analisis Anggaran Pertama	1
21.	Paranata Komputer Pertama	4
22.	Paranata Komputer Muda	2
23.	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama - Sekjend	2
24.	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Muda - Sekjend	5
25.	Pranata Keuangan APBN Trampil	1
26.	Pembina Keamanan Masyarakat Madya	2
27.	Pembimbing Masyarakat Madya	1
<b>TOTAL</b>		<b>103</b>

Realisasi Anggaran per 31 Desember Tahun 2024

AKUN	URAIAN	REALISASI	%
<b>051</b>	<b>Administrasi Kepegawaian</b>	<b>Rp. 1.338.269.340,-</b>	<b>100 %</b>
.0B	Pelaksanaan Ujian Dinas Tk I, Ujian Penyesuaian Ijazah dna Penilaian JFT	2.546.000,-	100 %
.0C	Orientasi CPNS & PPPK	Rp. 21.595.000,-	100 %
.0D	Seleksi CASN Tahun 2024	Rp. 1.216.937,-	100 %
.0E	Pengadaan Catat POLTEKIP dan POLTEKIM	Rp. 63.201.000,-	100 %
.0F	Pembinaan Pegawai Menjelang Pensiun	Rp. 33.150.000,-	100 %
<b>052</b>	<b>Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian</b>	<b>RP. 464.569.443,-</b>	<b>99.93 %</b>
.0A	Pembinaan Kepegawaian dan Baperjakat Eselon IV/V/JP/JF	Rp. 194.206.614,-	99.92 %
.0B	Bina Mental Pegawai	Rp. 71.227.400,-	99.88 %
.0C	Penanganan Hukuman Disiplin Pegawai	Rp. 21.595.429,-	99.95 %
.0D	Workshop Penggunaan Fitur E-Kinerja pada Aplikasi Simpeg Kemenkumham	Rp. 34.350.000,-	100 %
.0E	Kegiatan Pembinaan SDM	Rp. 143.190.000	99.96 %

**Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pengelola Keuangan dan BMN**

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan BMN mendapat prestasi TA 2024 berupa penghargaan dari KPPN Yogyakarta meliputi: IKPA Terbaik Satker KP/KD/SVNT Kategori Pagu Mikro Tahun Anggaran 2023 diraih oleh :

1. Peringkat II : Kanwil Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta (409185)
2. Peringkat III: Kanwil Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta (409182)

IKPA Terbaik Satker KP/KD/SVNT Kategori Pagu Kecil Tahun Anggaran 2023 diraih oleh:

1. Peringkat II: Kanwil Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta (409187)



### ***Kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023***

Mengikuti kegiatan Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan BMN Tingkat Wilayah Kementerian Hukum dan HAM tanggal 29 Januari sampai 2 Februari 2024 di Hotel Mercure Ancol Jakarta. Kegiatan rekonsiliasi berjalan dengan baik dan lancar, petugas SAIBA dan BMN Kantor Wilayah dapat menyelesaikan pada pemegang Dipa sesuai Unit eselon I nya masing-masing.



### ***Data Surat Perintah Pencairan Dana sesuai Aplikasi OM-SPAN***

Terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Aplikasi OM-SPAN per 15 Januari 2025 Tahun 2024 telah diterbitkan 242 SP2D oleh KPPN dengan rincian sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Kode Satker</b>	<b>Nama Satker</b>	<b>Jumlah SP2D</b>
1.	409180	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta (Ditjen AHU)	19
2.	409181	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta (Setjend)	87
3.	409182	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta (Ditjen Pemasarakatan)	6
4.	409183	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta (Ditjen Keimigrasian)	9
5.	409184	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta (Ditjen KI)	9

6.	409185	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta (Ditjen PP)	4
7.	409186	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta (Ditjen HAM)	2
8.	409187	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta (BPHN)	103
9.	409188	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta (Balitbang HAM)	3
<b>JUMLAH</b>			<b>242</b>

### ***Data Revisi Anggaran Tahun 2024***

Selama Tahun 2024 telah dilakukan revisi anggaran dari 9 Dipa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kode Satker	Nama Satker		
			POK	DIPA
1.	409180	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta (Ditjen AHU)	3	2
2.	409181	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta (Setjend)	3	6
3.	409182	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta (Ditjen Pemasarakatan)	1	3
4.	409183	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta (Ditjen Keimigrasian)	0	4
5.	409184	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta (Ditjen KI)	0	2
6.	409185	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta (Ditjen PP)	1	2
7.	409186	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta (Ditjen HAM)	1	1
8.	409187	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta (BPHN)	0	1
9.	409188	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta (Balitbang HAM)	0	2
<b>JUMLAH</b>			<b>9</b>	<b>21</b>

### ***Pencapaian Kualitas maupun Kualitas Layanan Penatausahaan BMN Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta***

Dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan pencapaian Layanan Penatausahaan BMN Kanwil Kemenkumham selama tahun 2024. Berbagai kegiatan untuk menopang pencapaian kualitas maupun kuantitas Layanan Penatausahaan BMN Kanwil Kemenkumham selama tahun 2024, dengan berbagai kegiatan diantaranya; Pengarahan Kepala Biro Pengelolaan BMN tentang Optimalisasi Pengelolaan BMN sebagai tindak lanjut

opini BPK di Aula Kanwil KUMHAM DIY dan Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan oleh Biro Keuangan di Aula Kanwil KUMHAM DIY. Pelaksanaan Audit Ketaatan Atas Pengelolaan BMN tahun 2024.

Data Rumah Dinas Kantor wilayah

NO	NUP	NAMA BARANG	ALAMAT	NO	NUP
1	2	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	Ngipik, RT 001/RW 16, Kec. Banguntapan, kel. Baturetno, Bantul 55197	Junita Sitorus	Kepala Kantor Wilayah Ditjenim DIY
2	3	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	Ngipik, RT 001/RW 16, Kec. Banguntapan, kel. Baturetno, Bantul 55197	Lily	Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas DIY
3	5	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	Jl HOS Cokroaminoto 158, Kec. Tegalrejo, Kel. Tegalrejo, Yogyakarta 55244	Soleh Joko Sutopo	Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum
4	4	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Jl HOS Cokroaminoto 158, Kec. Tegalrejo, Kel. Tegalrejo, Yogyakarta 55244	Eem Nurmanah	Kepala Divisi Pelayanan Hukum
5	5	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Jl HOS Cokroaminoto 158, Kec. Tegalrejo, Kel. Tegalrejo, Yogyakarta 55244	Retno Dewi Banowati	Kepala Bidang Pelayanan AHU
6	6	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Jl Kenanga TR III/769, RT 34, Kec. Tegalrejo, Kel. Tegalrejo, Yogyakarta 55244	FX Surya Kumara	Perencana Ahli Madya
7	7	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Jombor Lor 83, RT 03 RW 13, Kec. Mlati, kel. Sinduadi, Sleman 55284		
8	8	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Margotirto, RT 36/RW 09, Kec. Umbulharjo, Kel. Pandeyan, Yogyakarta 55161	Muhammad Akmal	Kepala Bidang Dokumen Perjalanan, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian
9	9	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Margotirto, RT 36/RW 09, Kec. Umbulharjo, Kel. Pandeyan, Yogyakarta 55161	K.A. Halim	Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal
10	10	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Margotirto, RT 36/RW 09, Kec. Umbulharjo, Kel. Pandeyan, Yogyakarta 55161	Kristina Hambawani	Kepala Bagian TU dan Umum Kanwil Ditjen PAS DIY

11	11	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Margotirto, RT 36/RW 09, Kec. Umbulharjo, Kel. Pandeyan, Yogyakarta 55161	Yudi Arto	Kepala Bagian TU dan Umum
12	13	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Jombor Baru Blok 8 No.187, RT01 RW02, Kec. Mlati, Kel. Sendangadi, Sleman 55285	Ganang Utoyo	Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan
13	14	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Jombor Baru Blok 8 No.187, RT01 RW02, Kec. Mlati, Kel. Sendangadi, Sleman 55285	Yustina Elistya Dewi	Kepala Bidang Pelayanan KI

Data Kendaraan Dinas Kantor wilayah

No.	Jenis Barang	Merk / Type	Nomor Polisi	Penanggung Jawab	
				Nama	Jabatan
1	2	3	4	5	6
1	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	Nissan Serena	AB 1159 DE		Kepala Bagian TU dan Umum Kanwil Kemenkum DIY
2	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	Toyota Fortuner	AB 58		Kepala Bagian TU dan Umum Kanwil Kemenkum DIY
3	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	Toyota Innova	AB 1764 UA		Kepala Bagian TU dan Umum Kanwil Kemenkum DIY
4	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	Toyota Innova	AB 1004 UA		Kepala Bagian TU dan Umum Kanwil Kemenkum DIY
5	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	Toyota Avanza	AB 1778 UA		Kepala Bidang Pembimbing Kemasyarakatan Kanwil Ditjen PAS DIY
6	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	Toyota Innova	AB 1141 UE		Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjen PAS DIY
7	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	Toyota Innova	AB 1238 BD		Kepala Bagian TU dan Umum Kanwil Kemenkum DIY
8	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	Toyota Innova	AB 1140 DE		Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjenim DIY

9	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	Toyota Innova	AB 1021 UH		Kepala Bidang Dokumen Perjalanan, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian
10	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	Honda CR-V 2.0 AT	AB-1727-UH		Kepala Bagian TU dan Umum Kanwil Kemenkum DIY Hukum dan Kepatuhan Internal
11	Pick Up	Suzuki New Carry Pick Up	AB-8015-AI		Kepala Bagian TU dan Umum Kanwil Kemenkum DIY
12	Mobil Unit Penerangan Darat	Isuzu DI Van (BSWG)	AB-8310-UA		Kadiv PP

No.	Jenis Barang	Merk / Type	Nomor Polisi	Penanggung Jawab	
				Nama	Jabatan
1	2	3	4	5	6
1	Sepeda Motor	Honda Supra X CW Honda	AB 2567 DE		Kepala Bagian TU dan Umum Kanwil Kemenkum DIY
2	Sepeda Motor	Honda NF 100 Supra X	AB 2028 IH		Kasubbid Pembinaan TI dan Kerja Sama Kanwil Ditjen PAS DIY
3	Sepeda Motor	Honda Karisma	AB 2951 UA		Perencana Ahli Madya Kanwil Kemenkum DIY
4	Sepeda Motor	Honda Supra X	AB 2953 UA		Kepala Bagian TU dan Umum Kanwil Kemenkum DIY
5	Sepeda Motor	Honda Supra X 125	AB 2176 IA		Analisis SDM ASN Muda Kanwil Kemenkum DIY
6	Sepeda Motor	Honda Legenda	AB 2105 IA		Bendahara Pengeluaran Kanwil Kemenkum DIY
7	Sepeda Motor	HONDA SUPRA X 125/NF 125 TD	AB-2175-IA		Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjen PAS DIY

8	Sepeda Motor	HONDA SUPRA X 125R NF 125 TR	AB-2414-DE		Kepala Bidang Dokumen Perjalanan, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian
9	Sepeda Motor	Suzuki Smash	AB 2027 IH		Kepala Bagian TU dan Umum Kanwil Kemenkum DIY
10	Sepeda Motor	Grand Impressa	AB 2525 UH		Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda Kanwil Kemenkum DIY
11	Kendaraan Bermotor Roda Tiga Pengangkut Barang	Viar Karya	AB-2319-IF		Kepala Bagian TU dan Umum Kanwil Kemenkum DIY
12	Sepeda Motor	Honda NF 125 D Karisma	AB 2574 UH		Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjenim DIY
13	Sepeda Motor	Honda NF 100 Supra Fit	AB-2452-UA		Analisis Kebijakan Muda Kanwil kemenkum DIY

***Pelaksanaan Audit Ketaatan Atas Pengelolaan BMN di Lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY***

Hasil yang dicapai dalam Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Penanganan dan Penertiban Audit Ketaatan atas pengelolaan Barang Milik Negara pada satuan kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta T.A 2023- 2024 pada Rumah Tahanan Kelas IIB Wates, sebagai berikut:

3. Terdapat BMN berupa Kendaraan Bermotor yang secara eksisting, maupun dalam pencatatan Aplikasi SIMAN telah melebihi batas maksimal Standar Kebutuhan BMN, antara lain berupa Kendaraan Operasional pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wates.
4. Terdapat BMN berupa Kendaraan Bermotor yang secara eksisting, maupun dalam pencatatan Aplikasi SIMAN telah melebihi batas maksimal Standar Kebutuhan BMN, antara lain berupa Kendaraan Operasional pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wates.



Pelaksanaan Audit Ketaatan Atas Pengelolaan BMN

Pelaksanaan lelang BMN Selain Tanah Dan Atau Bangunan Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Daerah Istimewa Yogyakarta Melalui E-Auction tanggal 20 Desember 2024



Kerja Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang/Jasa, Tahun 2024 antara lain :

Komisi 1 :

- Kanwil DIY tidak terdapat permasalahan terkait sertifikasi tanah, Seluruh satker di lingkungan Kanwil DIY sudah bersertifikat an. Pemerintah RI cq.

Kementerian Hukum dan HAM RI.

- Asuransi BMN dan Rumah Negara untuk saat ini dilaksanakan oleh pusat yaitu Kementerian oleh Sekretariat Jenderal, Biro Pengelolaan BMN dan Barang/Jasa.
- BMN yang belum PSP, Kanwil DIY sudah melakukan usulan ke Biro Pengelolaan BMN dan Barang/Jasa, Sebagian besar sudah keluar SK PSP dan sudah diinput dalam aplikasi SIMAN. Terhadap BMN yang belum keluar SK PSP, nanti akan dilakukan usulan lagi setelah launching aplikasi SIMAN Versi 2 pada bulan Agustus 2024.

Komisi 2 ;

- TL pemindahtanganan dan penghapusan BMN
  - ✓ Mengidentifikasi progres pengelolaan penjualan, penghapusan;
  - ✓ Menyiapkan data dukung pemindahtanganan satuan kerja DIY berupa bukti usulan penghapusan, persetujuan, permohonan lelang, persetujuan penjualan;
  - ✓ Memastikan SK penghapusan sudah terinput pada aplikasi SIMAN.
- TL BMN Rusak berat dan BMN mempunyai bukti kepemilikan Senjata Api
  - ✓ Data dukung Daftar BMN RB Usul ke Pengelola;
  - ✓ Data Siman Rusak Berat seluruh Satuan Kerja D.I. Yogyakarta;
  - ✓ Data Senjata Api sesuai Siman seluruh Satuan Kerja D.I. Yogyakarta.

Komisi 3 ;

Telah ditindaklanjuti semua beserta data dukung.

- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP, PDDT Manset Tahun 2022 dan Semester I 2023 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham DIY telah ditindaklanjuti;
- Data konfirmasi penggunaan BMN sesuai SBSK pada Rutan Kelas IIB Wates, Rutan Kelas IIB Bantul, Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, Lapas Kelas IIB Sleman, Lapas Kelas IIA Yogyakarta telah terpenuhi;
- Data dukung waktu penyampaian wasdal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham DIY telah terpenuhi;

Komisi 4 :

Data Dukung sudah terselesaikan.

Melakukan penginputan transaksi ke fitur pencatatan dan melakukan finalisasi e purchasing sampai penilaian kinerja penyedia. Terdapat peningkatan prosentase yang tadinya 53 % menjadi 55%. Bahwa nilai tersebut sudah termasuk sangat baik mengingat saat ini semester I, dan PPK satuan kerja sangat responsif ketika dalam monitoring ditemukan terlibatnya update pencatatan transaksi non tender dan penilaian kinerja penyedia.

### ***Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Fungsi Kehumasan***

Selama tahun 2024, Sub Bagian Humas Reformasi Birokrasi dan TI melakukan berbagai kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY.

TANGGAL	JUDUL
02-01-2024	Apel Pagi pertama di tahun 2024 Jajaran kanwil Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta
	Kakanwil DIY Pantau Pelaksanaan Pemilu di Lapas/Rutan
03-01-2024	Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham DIY menggelar 'jahe morning' mengawali kinerja di tahun 2024 terkait penandatanganan komitmen bersama pembangunan ZI
05-01-2024	Apel Awal Tahun 2024 seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM bersama Menteri Hukum dan HAM
08-01-2024	Kadivmin mengajak seluruh pegawai Kanwil Kemenkumham DIY untuk meningkatkan prestasi kinerja di tahun 2024
	melaksanakan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas, Pakta Integritas, dan Perjanjian Kinerja yang diikuti seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT)
	menghadiri Pembahasan Persiapan Pendampingan Pra Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan BMN Tahun 2023
09-01-2024	Pelantikan Pejabat Fungsional dan Pegawai Negeri Sipil
18-01-2024	Gelar Pra Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan BMN Semester II Tahun Anggaran 2023
	Kanwil Kemenkumham DIY mendorong para lurah untuk dapat berpartisipasi dalam kontestasi Paralegal Justice Award (PJA) Tahun 2024.
19-01-2024	Badan Pembinaan Hukum Nasional gelar Dengar Pendapat Partisipasi dalam rangka Penyusunan RUU Pembinaan Hukum Nasional
24-01-2024	Kakanwil pimpin Upacara Tabur Bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusumanegara Yogyakarta
	Kanwil Kemenkumham DIY mengikuti acara Entry Meeting Pemeriksaan BPK
	Ikuti sosialisasi Pemantauan dan evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di Lingkungan Kemenkumham oleh Kementerian Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi
29-01-2024	Kakanwil Kemenkumham DIY Lakukan Peninjauan Dokumen Fidusia pada

	Gedung Indo Arsip
<b>01-02-2024</b>	Menuju WBBM, Kemenkumham DIY Siap Maksimalkan Data Dukung dan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas
<b>06-02-2024</b>	Kadiv PAS Kemenkumham DIY Dampingi Sosialisasi dan Simulasi Pelaksanaan Pemilu 2024 di UPT
<b>07-02-2024</b>	Mengikuti kegiatan Workshop Reformasi Birokrasi secara virtual di Ruang Rapat Kanwil Kemenkumham DIY
<b>12-02-2024</b>	Kanwil Kemenkumham DIY menggelar Rapat Pembahasan Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Divisi Keimigrasian Tahun 2024.
	Kakanwil melantik 3 Notaris Pengganti
<b>13-02-2024</b>	Kanwil Kemenkumham DIY Ikuti Zoom Penyusunan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)
<b>14-02-2024</b>	Kakanwil DIY Pantau Pelaksanaan Pemilu di Lapas/Rutan
<b>15-02-2024</b>	Kakanwil Bersama Pemkab Gunungkidul Bahas Raperda Hari Jadi Kabupaten
<b>19-02-2024</b>	Biro Perencanaan Supervisi Jajaran Kanwil Kemenkumham DIY
<b>21-02-2024</b>	Terima Kunjungan Kerja Tim Sekretariat Jenderal DPRI RI
<b>23-02-2024</b>	Kanwil Kemenkumham DIY Bersama Direktorat Jenderal Pemasarakatan menggelar Festival Produk, Seni, dan Budaya Pemasarakatan Th.2024 se-Indonesia
<b>01-03-2024</b>	Rapat Koordinasi dengan Pemda Provinsi Bahas Implementasi Pergub 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa
<b>05-03-2024</b>	Kadivmin Terima Tim Monev dari Biro Keuangan Sekretariat Jenderal
<b>08-03-2024</b>	kegiatan penyampaian hasil verifikasi data dukung Reformasi Birokrasi (RB) Triwulan I (B03) Unit Eselon I dan Kantor Wilayah melalui aplikasi Zoom Meeting
<b>14-03-2024</b>	Selenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Arsip dan Aplikasi Persuratan bagi jajaran kantor wilayah Kemenkumham DIY
<b>18-03-2024</b>	Ikuti Upacara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kemenkumham RI
<b>22-03-2024</b>	Jalin Kolaborasi Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Kanwil Kemenkumham DIY Terima Kunjungan Studi Tiru Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Sultra
<b>25-03-2024</b>	Kemenkumham DIY kembali menggelar kegiatan Safari Ramadan di Lapas Yogyakarta
<b>04-04-2024</b>	Kanwil Kemenkumham DIY Hadiri Penyerahan LHP BPK RI atas LKPD DIY TA 2023
<b>10-04-2024</b>	WBP terima remisi khusus Hari Raya Idul Fitri 1445 H
<b>19-04-2024</b>	kegiatan senam pagi bersama pada hari Jumat
<b>20-04-2024</b>	Sekjen Kemenkumham Terima Gelar Adat "Kolakino Liwu Pancana"
<b>23-04-2024</b>	Perancang Peraturan Kanwil Kemenkumham DIY Beri Pembekalan Praktikum Legal Drafting di UIN Sunan Kalijaga
<b>24-04-2024</b>	Ikuti FGD Desain Kebijakan Evaluasi Pelaksanaan RB, Bahas Indikator Pembangunan ZI pada WBBM
<b>26-04-2024</b>	Sambut Hari Kekayaan Intelektual Sedunia Kanwil Kemenkumham DIY siarkan

	Podcast HKI
<b>03-05-2024</b>	Terima Kunjungan Indo Arsip, Bahas Persiapan Pemusnahan Arsip Fidusia
<b>07-05-2024</b>	Pendampingan Biro Perencanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) pada Kanim Yogyakarta.
<b>13-05-2024</b>	Pendampingan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kanwil DIY melakukan wawancara dan verifikasi lapangan di Bapas yogyakarta
<b>14-05-2024</b>	Sosialisasi Layanan Kenotariatan dengan mengangkat tema "Penegakan kode etik notaris
<b>19-05-2024</b>	Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham DIY Raih Juara Umum 1 Learning Tournament Diklat Prestasi KPK
<b>29-05-2024</b>	Kembali Raih Digital Government Award, Kemenkumham DIY jadi Kementerian Terbaik dalam Penerapan SPBE
	Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar acara Focus Group Discussion
<b>04-06-2024</b>	Kakanwil Tinjau Reviu Hasil Evaluasi Berjenjang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
<b>11-06-2024</b>	kegiatan supervisi pagu indikatif satuan kerja tahun anggaran 2025
<b>13-06-2024</b>	kunjungan dari Tim Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI
<b>19-06-2024</b>	Sosialisasi Layanan Perseroan Perorangan bagi UMKM di Kabupaten Kulon Progo
	kegiatan Evaluasi Capaian Kinerja Semester I dan Rencana Program Kerja Triwulan II Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan
<b>20-06-2024</b>	Kanwil Kemenkumham DIY melaksanakan evaluasi capaian kinerja Semester I Tahun 2024
<b>24-06-2024</b>	Kegiatan konsinyering Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan sosialisasi platform Layanan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) di Hotel Plaza Crowne Bandung
<b>25-06-2024</b>	Kegiatan Pra Rekonsiliasi Laporan BMN dan Keuangan yang dihadiri para Pimti Pratama, Pejabat Administrasi, dan operator SAKTI Satker
<b>02-07-2024</b>	kegiatan Diskusi Publik yang dilaksanakan oleh Badan Strategi Kebijakan (BSK)
<b>05-07-2024</b>	Kakanwil mengunjungi Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kabupaten Sleman "Triniken Tiyas Tirlin"
<b>09-07-2024</b>	Wujudkan Kinerja UPT Optimal, Kadiv PAS Kemenkumham DIY Pimpin Monev di Rupbasan Wates
<b>16-07-2024</b>	Giat Operasi Gabungan Pengawasan Orang Asing di Kabupaten Sleman dan Bantul untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan keimigrasian
<b>18-07-2024</b>	Pendampingan penyusunan data dukung Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi (RB) di Kanim Yogyakarta
<b>19-07-2024</b>	Kegiatan sosialisasi merek bagi pelaku usaha di wilayah DIY dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY
<b>23-07-2024</b>	Peringatan Hari Anak Nasional, Kemenkumham DIY Berikan Remisi Kepada 7 Anak Binaan Pemasarakatan
<b>30-07-2024</b>	kedatangan tim dari Sekretariat Jenderal untuk melakukan persiapan pelaksanaan SKD Calon Taruna Politeknik Ilmu Pemasarakatan dan Politeknik Ilmu Imigrasi di Yogyakarta
<b>05-08-2024</b>	Kanwil Kemenkumham DIY mengikuti Launching Webinar Series I dengan tema "Cerdas Bersama BPSDM Hukum dan HAM"
<b>07-08-2024</b>	Kanwil Kemenkumham DIY menggelar kegiatan bakti sosial di Dusun Turgo, Sleman
<b>15-08-2024</b>	Kemenkumham DIY Dampingi Kanim Yogyakarta dan Lapas Wonosari menuju WBBM
<b>19-08-2024</b>	Kemenkumham DIY Gelar Upacara Hari Pengayoman ke-79, Tekankan Semangat Pengabdian untuk Negeri

<b>28-08-2024</b>	Pelantikan Pejabat Manajerial dan Non Manajerial serta Serah terima Jabatan Kepala UPT
<b>05-09-2024</b>	Melakukan Pendampingan Penyusunan RKT RB, SPBE, dan Pengelolaan Webisite
	Terima kunjungan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
<b>09-09-2024</b>	Gelar Verifikasi dan Re-Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum LKBH FH Universitas Janabadra
<b>17-09-2024</b>	LPKA Yogyakarta terus berkomitmen dalam memberikan kesempatan pendidikan bagi anak-anak yang sedang menjalani masa pidana
<b>18-09-2024</b>	Kakanwil dilantik menjadi Majelis Pengawas Wilayah Notaris (WPWN) dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah DIY
<b>25-09-2024</b>	Penyuluhan hukum tentang pencegahan dan penanganan kasus bullying di lingkungan kampus di UMY
<b>26-09-2024</b>	Kegiatan monev ke UPT guna capaian target realisasi anggaran dan IKPA Triwulan III TA 2024
<b>01-10-2024</b>	Kanwil Kemenkumham selenggarakan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila
<b>03-10-2024</b>	Ikuti Sosialisasi Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
<b>09-10-2024</b>	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY terus berkomitmen meningkatkan kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
	Kadiv PAS menjadi pemateri Koordinasi yang diadakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di Riss hotel Yogyakarta
<b>16-10-2024</b>	kegiatan Studium Generale yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan UGM
<b>19-10-2024</b>	Kanwil DIY resmi memulai pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) untuk CPNS tahun 2024
<b>21-10-2024</b>	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM DIY Perkuat Regulasi Daerah dan Harmonisasi Kebijakan
<b>24-10-2024</b>	Direktorat Pidana Ditjen AHU Gandeng Akademisi dan Pengadilan Negeri di DIY Bahas Hukum Perkawinan Tak Tercatat
<b>28-10-2024</b>	Peringati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2024, Kakanwil Dorong Peningkatan IPP
<b>01-11-2024</b>	kegiatan "Jumat Sehat" yang diikuti oleh seluruh pegawai
<b>05-11-2024</b>	Hadiri kegiatan persiapan Anugerah Legislasi Daerah 2024 serta sosialisasi penggunaan aplikasi e-Pemetaan
	WBP diberikan kesempatan untuk erkarya dengan promosikan Pelaku UMKM
<b>12-11-2024</b>	Kakanwil melantik pejabat fungsional analis SDM aparatur ahli muda
<b>14-11-2024</b>	Kakanwil pimpin rapat Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Kanwil
<b>21-11-2024</b>	Harmonisasi Peraturan Daerah dan Kota di DIY
<b>26-11-2024</b>	Kegiatan Penguatan Layanan Hukum yang diikuti oleh seluruh pegawai Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
<b>05-12-2024</b>	Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
	Kanwil DIY gelar Operasi Gabungan (OSGAB) Tim Pengawasan Orang Asing di Kabupaten bantul dan seman
<b>13-12-2024</b>	Staf Khusus Menteri Hukum Tinjau SKB CPNS Kemenkumham di Yogyakarta, Apresiasi Transparansi dan Kejujuran Proses
<b>19-12-2024</b>	Kanwil DIY Selenggarakan Upacara Peringatan Hari Bela Negara ke-76
	kegiatan koordinasi dengan Pengelola JDIH Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Jakarta

<b>21-12-2024</b>	Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan pentingnya internalisasi nilai-nilai Pancasila
<b>30-12-2024</b>	Kantor Wilayah Kemenkum DIY Gelar Apel Pagi Akhir Tahun 2024

***Mengikuti Bimbingan Teknis Percepatan Kinerja SPBE***

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan indeks SPBE sebagai salah satu indikator Reformasi Birokrasi (RB) Meso yang menjadi fokus dalam capaian kinerja Kemenkumham. Secara daring mengenai langkah-langkah percepatan kinerja sektor Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Dalam bimbingan teknis tersebut, materi yang disampaikan meliputi penyusunan dokumen manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Resiko, daftar aset Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang TI, khususnya bagi Jabatan Fungsional Pranata Komputer.



Tempat Working Space Kanwil DIY

***Penguatan Reformasi Birokrasi oleh Staf Ahli Menteri Hukum***

Kegiatan Penguatan Reformasi Birokrasi di Kakanwil Kemenkumham DIY oleh Staf Ahli Menteri Hukum, Kegiatan yang berlangsung di Aula Kanwil Kemenkumham DIY ini menjadi momen penting dalam mendorong implementasi RB di lingkungan Kemenkumham DIY



Kegiatan di Aula Kantor Wilayah

### ***Peningkatan Kualitas Fungsi Program dan Pelaporan***

Kegiatan pendampingan dengan Biro Perencanaan, kegiatan tersebut terdapat mekanisme perubahan dengan membekali arahan penguatan Zona Integritas (ZI) oleh Biro Perencanaan, Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal dengan melakukan pendampingan secara intensif atas implementasi ZI terhadap satuan kerja yang menuju WBBM dan memberikan apresiasi komitmen dan konsistensi satuan kerja dalam membangun ZI.



Kegiatan di Lapas Wonosari

Dalam penyampaianannya Biro Perencanaan mengingatkan bahwa dalam pembangunan ZI merupakan peran dari semua pihak, mulai dari pegawai hingga petugas kebersihan. Dalam mewujudkan WBBM merupakan tanggung jawab bersama. Tidak hanya tim ZI, tapi seluruh pegawai harus terlibat aktif;



Kegiatan di Kantor Imigrasi Yogyakarta

***Kegiatan Penyusunan RKT Reformasi Birokrasi General dan Pedoman Pelaksanaan ZI;***

Kegiatan yang diikuti oleh seluruh perwakilan Kantor Wilayah yang membidangi Reformasi Birokrasi ini, baik secara langsung maupun virtual, bertujuan untuk menyusun usulan kegiatan RB General tahun 2025 sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RB Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi. Tujuan untuk menyusun usulan kegiatan RB General tahun 2025 sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi.



Kegiatan RKT RB di Cinere Jawa barat

## II. DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

Subbid Administrasi hukum Umum, Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Bidang Pelayanan AHU Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta sepanjang Tahun 2024 meliputi:

### 1. Koordinasi dengan Direktorat Jenderal AHU terkait Layanan AHU di Wilayah.

Pada Tahun 2024 Bidang Pelayanan AHU yang dipimpin oleh Kabid Pelayanan Hukum melakukan koordinasi terkait layanan AHU dan rencana aksi di Wilayah. Koordinasi ini dilakukan terkait Layanan Notariat, Layanan Fidusia, Layanan Pewarganegaraan dan Kewarganegaraan. Koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait layanan AHU dan rencana aksi di Wilayah sehingga kegiatan yang dilaksanakan berbanding lurus dengan Ditjen AHU.



### 2. Perseroan Perorangan.

Bidang Pelayanan AHU Kanwil D.I. Yogyakarta sudah melakukan koordinasi dengan instansi terkait, antara lain Kantor Pajak, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Wilayah D.I. Yogyakarta. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada Masyarakat khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga melalui layanan Perseroan Perorangan ini, para pelaku UMKM bisa lebih berkembang dan semakin maju.



### 3. Pewarganegaraan dan Kewarganegaraan

Selama Tahun 2024 Bidang Pelayanan AHU Kanwil Kemenkum D.I. Yogyakarta telah melakukan Sosialisasi terkait Pewarganegaraan dan Kewarganegaraan. Kegiatan ini dilakukan di Hotel Grand Loman pada tanggal 19 dan 20 Februari 2024 dengan menghadirkan 100 orang peserta di masing-masing kegiatan. Kegiatan Sosialisasi Pewarganegaraan dilaksanakan sebagai bagian dari sosialisasi PP Nomor 21 Tahun 2022 khususnya pasal 3A yang akan segera habis masa berlakunya pada tanggal 31 Mei 2024. Sepanjang Tahun 2024 Bidang Pelayanan AHU sudah melakukan verifikasi dokumen dan visitasi kepada 13 orang pemohon. Selain melakukan sosialisasi, Bidang Pelayanan AHU Kanwil Kemenkum D.I. Yogyakarta juga melakukan koordinasi dengan instansi terkait antara lain dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Universitas dan Sekolah di Wilayah D.I. Yogyakarta.

### 4. Apostille dan Legalisasi

Pada Tahun 2024 ini, Kanwil D.I. Yogyakarta melakukan koordinasi dengan beberapa Universitas dan sekolah Internasional terkait layanan Apostille. Banyaknya pemohon Apostille di Yogyakarta, membuktikan bahwa layanan ini mulai diterima oleh Masyarakat umum. Selain pemohon yang datang dari Yogyakarta, ada juga Masyarakat dari daerah penyangga disekitar D.I. Yogyakarta yang memanfaatkan kondisi geografis untuk mencetak sertifikat tersebut di Kanwil Kemenkum Yogyakarta. Sepanjang Tahun 2024, pencetakan sertifikat Apostille di Kanwil Kemenkum Yogyakarta sudah mencapai 3.123 sertifikat dan Legalisasi dokumen sejumlah 122 sertifikat. Pada Tahun 2024 ini, Kanwil D.I. Yogyakarta

tetap memberikan pelayanan kepada Masyarakat dengan membuka layanan di Kantor Wilayah Kemenkum D.I. Yogyakarta. Banyaknya pemohon Apostille di Yogyakarta, membuktikan bahwa layanan ini mulai diterima oleh Masyarakat umum. Selain pemohon yang datang dari Yogyakarta, ada juga Masyarakat dari daerah penyangga disekitar D.I. Yogyakarta yang memanfaatkan kondisi geografis untuk mencetak sertifikat tersebut di Kanwil Kemenkum Yogyakarta.



## 5. Notariat

### a) Sinkronisasi Data Notaris

Salah satu rencana aksi dari Bidang Pelayanan AHU Kanwil Kemenkum D.I. Yogyakarta adalah menghimpun data Notaris untuk dilaporkan kepada Dirjen AHU sebagai salah satu proses untuk mensinkronkan data Notaris di wilayah dengan Pusat. Untuk mendapatkan data yang valid, Bidang AHU berkoordinasi dengan Majelis Pengawas Daerah Notaris di wilayah D.I. Yogyakarta. Sebagai salah satu rencana aksi dari Bidang Pelayanan AHU Kanwil Kemenkum D.I. Yogyakarta adalah menghimpun data Notaris untuk dilaporkan kepada Dirjen AHU sebagai salah satu proses untuk mensinkronkan data Notaris di wilayah dengan Pusat. Untuk mendapatkan data yang valid, Bidang AHU berkoordinasi dengan Majelis Pengawas Daerah Notaris di wilayah D.I. Yogyakarta. Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Elektronik Monitoring Notaris (SIEMON) yang dimiliki oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta, data notaris yang ada di Kabupaten / Kota D.I. Yogyakarta berjumlah 559 Notaris, Sementara Direktorat Administrasi Hukum Umum telah mengirimkan data Notaris yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Kantor wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun data notaris dimaksud adalah sejumlah 642 Notaris.



b) Laporan Pengaduan Profesi Notaris

Sepanjang Tahun 2024, jumlah laporan pengaduan terhadap profesi Notaris yang masuk baik melalui Majelis Kehormatan Notaris (MKN), Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) dan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) berjumlah 62 Laporan. Sebagian besar laporan sudah ditindaklanjuti dan sudah selesai dilakukan pemeriksaan. Berikut adalah data jumlah pengaduan profesi Notaris yang masuk ke Kanwil Kemenkum D.I. Yogyakarta.



c) Penguatan Peran Pengawasan Notaris

Dalam rangka memberikan penguatan terhadap pengawasan Notaris, Kanwil Kemenkum D.I. Yogyakarta mengadakan rapat koordinasi. Rapat koordinasi ini dilaksanakan mengingat adanya pergantian anggota Majelis Pengawas Notaris. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2024 di Hotel Sahid Raya dengan menghadirkan seluruh anggota MKN, MPW dan MPD di wilayah D.I. Yogyakarta.



d) Pelaksanaan CAT Notaris

Direktorat Jenderal AHU bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta dan Badan Kepegawaian Negara Kanreg I Yogyakarta telah melaksanakan ujian *Computer Assesment Test* (CAT) bagi calon Notaris baru. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 1 dan 10 Oktober 2024 dengan jumlah peserta sebanyak 300 peserta yang tidak hanya berasal dari D.I. Yogyakarta, namun juga dari daerah lain. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menghasilkan Notaris yang berkualitas dan memiliki integritas yang tinggi.

#### e) Pelantikan Notaris

Pada Tahun 2024, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta, telah melantik 27 Notaris yang terdiri dari Notaris baru dan Notaris pengganti di wilayah D.I. Yogyakarta

#### 6. Fidusia

Terkait Fidusia, pada Tahun 2024 Bidang Pelayanan AHU Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan pendampingan terhadap kantor perbankan dan pembiayaan dalam rangka penghapusan jaminan Fidusia yang telah selesai masa pembiayaan. Pembebanan jaminan fidusia memerlukan pengelolaan data yang cermat dan akurat serta pengelolaan sistem informasi yang cepat dan efisien, termasuk dalam hal pencatatan, pembaruan dan penghapusan informasi yang berkaitan dengan jaminan fidusia tersebut. Kantor Pembiayaan, Perbankan dan Notaris selaku penerima kuasa pendaftaran jaminan fidusia, tentunya berperan aktif untuk menciptakan optimalisasi pengelolaan data serta menciptakan sistem informasi yang cermat dan akurat. Peran aktif tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan tertib melakukan proses penghapusan jaminan fidusia terhadap jaminan yang didaftarkan dan telah diselesaikan oleh pemberi fidusia khususnya untuk data yang tercantum di sistem AHU Online Kementerian Hukum dan HAM. Kantor Pembiayaan, Perbankan dan Notaris diharapkan bisa melakukan verifikasi dan melaksanakan penghapusan data fidusia yang telah selesai masa pembiayaan.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, khusus di lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri terdapat 13.355 data pendaftaran jaminan fidusia yang belum dihapuskan oleh pihak penerima fidusia. Sementara penghapusan terhadap jaminan fidusia yang telah selesai masa pembiayaan berjumlah 3.756 dokumen.



## 7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Terkait PPNS, Bidang Pelayanan AHU Kanwil Kemenkum D.I. Yogyakarta mendampingi tim dari Direktorat Pidana Ditjen AHU terkait pemutakhiran data PPNS. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari sinkronisasi data antara Ditjen AHU, Kantor Wilayah dan Instansi terkait di wilayah. Kegiatan koordinasi ini juga merupakan bentuk dari kerjasama yang sudah terjalin antara Kantor Wilayah dan instansi terkait yang sudah berjalan dengan baik. Pada Tahun 2024 ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta telah melakukan pelantikan PPNS sebanyak 6 (enam) orang pegawai yang berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Kehutanan.



## 8. Partai Politik

Pada Tahun 2024, Direktorat Jenderal AHU bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta melaksanakan kegiatan “*Tatanegara Goes to Campuss*” pada tanggal 16 Oktober 2024 yang bertempat di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kegiatan ini dilakukan untuk menampung aspirasi dari para mahasiswa dalam membenahi proses demokrasi yang terjadi di Indonesia, khususnya dalam penguatan fungsi partai politik. Kegiatan ini dihadiri oleh kurang lebih 100 mahasiswa dengan mengundang narasumber dari Akademisi.



## 9. Menghadiri Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal AHU.

Pada tanggal 8-11 Desember 2024 di hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Bidang Pelayanan AHU Kantor Wilayah Kementerian Hukum D.I. Yogyakarta menghadiri Rapat Kerja Teknis (Rakernis) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri Hukum, Deputy Bidang Kerjasama Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal, Para Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri di lingkungan Kementerian Hukum, Para Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum pada Unit Pusat serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan jajaran dari 33

Kantor Wilayah Kementerian Hukum, serta seluruh Kepala Balai Harta Peninggalan (BHP) dan jajaran, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Ditjen AHU dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen AHU di wilayah



## A. Tabel Kegiatan

### 1. Perseroan Perorangan

Pada Tahun 2024 ini, UMKM yang sudah mendaftarkan usahanya menjadi PT Perorangan adalah sebagai berikut:

A.	Kabupaten	Pendirian	Perubahan	Badan Hukum Aktif
1.	Bantul	435	68	445
2.	Gunung Kidul	97	8	98
3.	Kulonprogo	72	5	74
4.	Sleman	794	132	837
5.	Kota Yogyakarta	257	38	275

Tabel 1. Data PT Perorangan Tahun 2024

## 2. Apostille dan Legalisasi

Sepanjang Tahun 2024, pencetakan sertifikat Apostille di Kanwil Kemenkum D.I Yogyakarta sudah mencapai 734 sertifikat.

<b>Bulan</b>	<b>Jumlah Pencetakan</b>
Januari	186
Februari	200
Maret	366
April	183
Mei	156
Juni	159
Juli	246
Agustus	214
September	245
Oktober	239
November	255
Desember	674

Tabel 2. Jumlah pencetakan sertifikat Apostille pada Kanwil Kemenkum D.I. Yogyakarta

Bulan	Jumlah Pencetakan
Januari	0
Februari	0
Maret	0
April	0
Mei	5
Juni	13
Juli	24
Agustus	35
September	21
Oktober	14
November	3
Desember	7

Tabel 2. Jumlah pencetakan sertifikat Legalisasi pada Kanwil Kemenkum D.I. Yogyakarta

### 3. Laporan Pengaduan Profesi Notaris

Sepanjang Tahun 2024, jumlah laporan pengaduan terhadap profesi Notaris yang masuk baik melalui Majelis Kehormatan Notaris (MKN), Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) dan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) berjumlah 62 Laporan

Tahun 2024	Jumlah Kasus	Selesai	Proses	Belum Selesai
MKN	40	40	0	0
MPW	13	7	5	1
MPD Sleman	5	5	0	0
MPD Kota	2	2	0	0

MPD Bantul	1	1	0	0
MPD KP	1	1	0	0
MPD GK	0	0	0	0
<b>JUMLAH</b>	<b>62</b>	<b>57</b>	<b>5</b>	<b>1</b>

Tabel 3. Jumlah pengaduan profesi Notaris

## Matrik Capaian Kinerja

Tabel 3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Program Administrasi Hukum Umum

Tahun 2023 dan 2024

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2023			2024		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	-8.2%	-163.8%	6%	-8.1%	-134,9%
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	86%	100 %	116%	90%	90,32%	100,35%

Target penerimaan PNBP Administrasi Hukum Umum pada tahun 2024 adalah Rp. 7.867.956.000 dan penerimaan PNBP Administrasi Hukum Umum pada tahun 2024 sebesar Rp. 6.554.050.000,-. Namun jika dibandingkan dengan penerimaan PNBP tahun 2023 terjadi penurunan penerimaan dimana pada tahun 2023 realisasi penerimaan PNBP sebesar Rp. 8.032.050.000,-. Penurunan penerimaan PNBP Administrasi Hukum Umum ini dikarenakan pada tahun 2024, daya beli masyarakat Indonesia menurun ditambah kondisi perekonomian Indonesia yang belum stabil.

### **Realisasi Penyerapan Anggaran Bidang Administrasi Hukum Umum TA 2024**

- PAGU Anggaran sebesar Rp. 2.439.601.000,-
- Realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp. 2.434.744.023,- atau 99,80 %

### **Realisasi Penerimaan PNBPN Bidang Administrasi Hukum Umum TA 2024**

- Target tahun 2024 sebesar Rp 7.867.956.000,-
- Realisasi Tahun 2024 Sebesar Rp 6.554.050.000,- mengalami penurunan Rp 1.313.906.000,- dari target penerimaan tahun 2024.

**Tabel 3.2 Perhitungan Kinerja Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat Tahun 2024**

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>PERSENTASE CAPAIAN KERJA</b>
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	90%	Jumlah pengaduan masyarakat yang terselesaikan dibagi jumlah pengaduan masyarakat yang masuk dikali 100%  (56/62 x 100%) = 90,32%	Realisasi dibagi target dikali 100%  (90,32/90 x 100%) = 100,35%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari 62 pengaduan masyarakat yang masuk terkait pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di D.I. Yogyakarta sepanjang tahun 2024, telah diselesaikan. Target penyelesaian pengaduan Masyarakat terhadap notaris sebesar 90%, sementara realiasi penyelesaian pengaduan masyarakat terkait Notaris pada tahun 2024 sudah mencapai 90,32%. Jadi persentase capaian kerja terkait penyelesaian laporan pengaduan masyarakat adalah 100,35 %. Dengan demikian, kinerja penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di D.I. Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan.

## ***Pelaksanaan Capaian kinerja Sub Bidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum***

Pelaksanaan Kinerja Subbidang Pengkajian, Peneliti dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 sebagai berikut :

### **1. Evaluasi Kebijakan Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia**

- a. Pembentukan Tim Analisis Implementasi terkait Pedoman Griya Abhipraya pada bulan Februari 2024;
- b. Penyusunan Desain Analisis Implementasi dan Formulir Profil Kebijakan terkait Pedoman Griya Abhipraya pada bulan Juni 2024;
- c. Pengumpulan data lapangan dan wawancara serta membuat laporan tabel instrumen wawancara terkait pelaksanaan Griya Abhipraya pada bulan Juni s.d Agustus 2024;
- d. Penyusunan proposal Analisis Implementasi terkait Pedoman Griya Abhipraya pada bulan Juni 2024;
- e. Penyusunan bagian pembahasan Analisis Implementasi terkait Pedoman Griya Abhipraya penyajian data dan analisis pada kertas kerja pada bulan Agustus 2024;
- f. Penyusunan simpulan dan rekomendasi Analisis Implementasi terkait Pedoman Griya Abhipraya pada bulan Agustus 2024;
- g. Penyusunan laporan dalam bentuk kertas kerja hasil Analisis Implementasi terkait Pedoman Pelaksanaan Griya Abhipraya dan disampaikan ke Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada bulan Agustus 2024;
- h. Hasil Evaluasi Kegiatan Evaluasi Kebijakan Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada bulan Desember 2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan nilai dalam kategori UNGGUL dengan predikat TERBAIK ke IV.

### **2. Analisis kebijakan dengan pemanfaatan Sistem Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia (SIPKUMHAM)**

- a. Pembentukan Tim SIPKUMHAM Tahun 2024 pada bulan Januari 2024;

- b. Membuat daftar inventaris dan identifikasi isu kebijakan pada bulan Januari 2024;
- c. Melaksanakan verifikasi lapangan kajian periode I permasalahan Tinjauan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia pada tanggal 15 Februari 2024 di Bagian Kependudukan Daerah Istimewa Yogyakarta dan 8 Maret 2024 di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta;
- d. Melakukan pengolahan dan analisis data kajian periode I permasalahan Tinjauan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang melibatkan Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta dan Bagian Kependudukan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- e. Melakukan pemaparan hasil kajian periode I permasalahan Tinjauan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 19 Maret 2024 dengan Narasumber dari Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta dan Bagian Kependudukan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- f. Melaporkan hasil kajian periode I permasalahan Tinjauan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia pada bulan Mei 2024;
- g. Melaksanakan verifikasi lapangan kajian periode II dengan tema Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Bagi Anak Korban Kekerasan

Seksual Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan pada tanggal 8 Mei 2024 di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Riffka Annisa Yogyakarta dan 22 Mei 2024 di Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

- h. Melakukan pengolahan dan analisis data kajian periode II dengan tema Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang melibatkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rifka Annisa dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
- i. Melakukan pemaparan hasil kajian periode II dengan tema Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dengan narasumber dari LBH Rifka Annisa dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tanggal 25 Juni 2024;
- j. Melaporkan hasil kajian periode II dengan tema Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan pada bulan November 2024;
- k. Menyusun laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan analisis kebijakan dengan pemanfaatan SIPKUMHAM pada bulan Desember 2024.

### **3. Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Indeks Persepsi Korupsi – Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK-IKM)**

- a. Pembentukan SK Tim Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis SPAK SPKP Tahun 2024 pada bulan Januari 2024;
- b. Penyusunan Proposal Laporan evaluasi pelaksanaan survey SPAK SPKP Bab I pada bulan Februari 2024;
- c. Melaksanakan pemetaan pemenuhan jumlah responden masing-masing satker, DIM dan rencana tindaklanjut dengan monitoring dan evaluasi ke satuan kerja dengan dilaksanakan rapat pada tanggal 1 April 2024, 30 April dan 27 Mei 2024 di Ruang Rapat Bidang HAM;
- d. Membuat laporan monitoring dan evaluasi survey SPAK SPKP per triwulan sesuai dengan aplikasi 3AS;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi survey SPAK SPKP ke satuan kerja pada bulan Februari s.d November 2024.

#### **4. Pendampingan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum (IRH) di wilayah**

- a. Pembentukan SK Tim Sekretariat IRH di Kantor Wilayah. Penyusunan Tim Sekretariat Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) untuk menjadi pendamping Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Januari 2024;
- b. Melakukan Sosialisasi Terkait Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada seluruh Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan wilayah masing-masing. Tahap penyusunan tim kerja dan tim asesor masing-masing pada tanggal 27 Februari 2024;
- c. Melakukan pendampingan pengunggahan data dukung kepada tim kerja masing-masing instansi yang sudah disusun dalam penilaian mandiri pelaksanaan IRH pada Pemerintah Daerah pada bulan April s.d Juni 2024;
- d. Tim Sekretariat Wilayah melakukan verifikasi dengan mengisi Lembar Kontrol tiap tahapan variabel masing-masing instansi daerah dan diserahkan ke Tim Sekretariat Nasional sebagai laporan. Dalam melakukan verifikasi awal data dukung tersebut dimaksudkan untuk melihat kelengkapan dan relevansi data dukung. Jika data dukung masih belum lengkap maka Tim Sekretariat Wilayah dapat meminta tim kerja dan tim asesor untuk melengkapinya. Jika sudah lengkap tim kerja mengunggah data dukung ke aplikasi IRH pada bulan Juli 2024;
- e. Tim Sekretariat Wilayah melakukan klarifikasi kepada tim kerja dan tim asesor instansi. Dalam hal terdapat gap atau perbedaan nilai mandiri dan nilai awal Pemerintah Daerah dapat melakukan klarifikasi kepada Tim Sekretariat Wilayah. Hasil Klarifikasi tersebut menjadi bahan pembahasan dalam kegiatan forum yang diselenggarakan oleh Tim Sekretariat Nasional pada bulan Agustus 2024;
- f. Mengawasi tim assessor mengunggah berita acara yang sudah ditandatangani tim asesor ke tim penilai nasional pada bulan Oktober 2024
- g. Penetapan hasil penilaian oleh Menteri Hukum dan HAM RI pada bulan Desember 2024 dengan hasil Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan Terbaik III dengan kategori Satker Kecil dan Pemerintah Propinsi Daerah DIY mendapatkan terbaik I secara

nasional.

#### **5. Diseminasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah**

- a. Pembentukan SK Tim Diseminasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan HAM di Wilayah melalui Diskusi Strategi Kebijakan pada tanggal 1 Oktober 2024;
- b. Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Diseminasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan HAM di Wilayah melalui Diskusi Strategi Kebijakan pada bulan Oktober 2024;
- c. Membuat dan menyebarkan poster pelaksanaan kegiatan Diseminasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah melalui Diskusi Strategi Kebijakan yang berisi tema, narasumber, moderator, waktu pelaksanaan, link pendaftaran dan disebar ke media sosial dan grup kantor wilayah mulai tanggal 16 Oktober 2024;
- d. Melakukan koordinasi ke narasumber kegiatan Diseminasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah melalui Diskusi Strategi Kebijakan pada tanggal 27 September 2024 ke Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta;
- e. Melaksanakan Kegiatan Diseminasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah melalui Diskusi Strategi Kebijakan dengan narasumber Direktur Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (PUSHAM UII) Bapak. Eko Riyadi, S.H., M.H dan Direktur Pusat Studi Kejahatan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Bapak Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H , pada tanggal 22 Oktober 2024 dengan jumlah pendaftar 628 orang, jumlah peserta secara luring 60 orang dan daring melalui aplikasi *zoom meeting* sebanyak 181 orang dan *streaming youtube* sebanyak 40 orang. Peserta mendapatkan sertifikat dari Balai Pendidikan dan Latihan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dengan konversi 4 jam pelajaran (JP).

**6. Penerbitan Jurnal Wicara Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta**

- a. Pembentukan SK Tim Penerbitan Jurnal Wicara Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 25 Januari 2024;
- b. Pembentukan SK Mitra Bestari Jurnal Wicara Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 25 Januari 2024;
- c. Penerbitan Jurnal Wicara Hukum dan Hak Asasi manusia dalam setahun sebanyak 2x pada bulan Maret dan September 2024;
- d. Melaksanakan Workshop OJS dalam rangka akreditasi jurnal pada tanggal 30 Mei 2024.
- e. Melakukan evaluasi pelaksanaan penerbitan Jurnal Wicara Hukum dan Ham Asasi Manusia bersama Tim TI (Teknologi Informasi) dan menyusun rencana penyesuaian aplikasi jurnal tahun 2025 pada bulan Desember 2024.

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TAHUN 2024												KETERANGAN		
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES			
1.	Evaluasi Kebijakan Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pembentukan Tim dan penentuan tema	√														
		Penyusunan Desain Analisis Implementasi dan Formulir Profil Kebijakan						√									
		Pengumpulan data lapangan dan wawancara serta membuat laporan tabel instrumen wawancara dan FGD						√	√	√							
		Penyusunan proposal Analisis Implementasi terkait Pedoman Griya Abhipraya									√						
		Penyusunan bagian pembahasan Analisis Implementasi terkait Pedoman Griya Abhipraya penyajian data dan analisis pada kertas kerja										√					
		Penyusunan simpulan dan rekomendasi Analisis Implementasi terkait Pedoman Griya Abhipraya										√					
		Penyusunan laporan dalam bentuk kertas kerja hasil Analisis Implementasi terkait Pedoman Griya Abhipraya dan disampaikan ke BSK Kementerian Hukum dan HAM										√					
		Hasil Evaluasi Kegiatan Evaluasi Kebijakan Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh BSK Kementerian Hukum dan HAM RI Kanwil Kementerian Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta mendapatkan nilai kategori UNGGUL dengan predikat terbaik ke IV														√	

2.	Analisis kebijakan dengan pemanfaatan SIPKUMHAM	Pembentukan Tim SIPKUMHAM Tahun 2024	√													
		Membuat daftar inventaris dan identifikasi isu kebijakan	√													
		Melaksanakan verifikasi lapangan kajian periode I permasalahan Tinjauan Hukum dan HAM terhadap Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI		√	√											
		Melakukan pengolahan dan analisis data kajian periode I permasalahan Tinjauan Hukum dan HAM terhadap Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI yang melibatkan PUSHAM UII dan Bagian Kependudukan Pemerintah Daerah DIY		√	√											
		Melaporkan hasil kajian periode I permasalahan Tinjauan Hukum dan HAM terhadap Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan dan				√										

Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI													
Melaksanakan verifikasi lapangan kajian periode II dengan tema Perlindungan Hukum dan HAM Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di LBH Riffka Annisa Yogyakarta dan di Pengadilan Tinggi Yogyakarta				√									
Melakukan pengolahan dan analisis data kajian periode II dengan tema Perlindungan Hukum dan HAM Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang melibatkan LBH Rifka Annisa dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta				√									
Melakukan pemaparan hasil kajian periode II dengan tema Perlindungan Hukum dan HAM Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dengan narasumber dari LBH Rifka Annisa dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta					√								
Melaporkan hasil kajian periode II dengan tema Perlindungan Hukum dan HAM Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan											√		



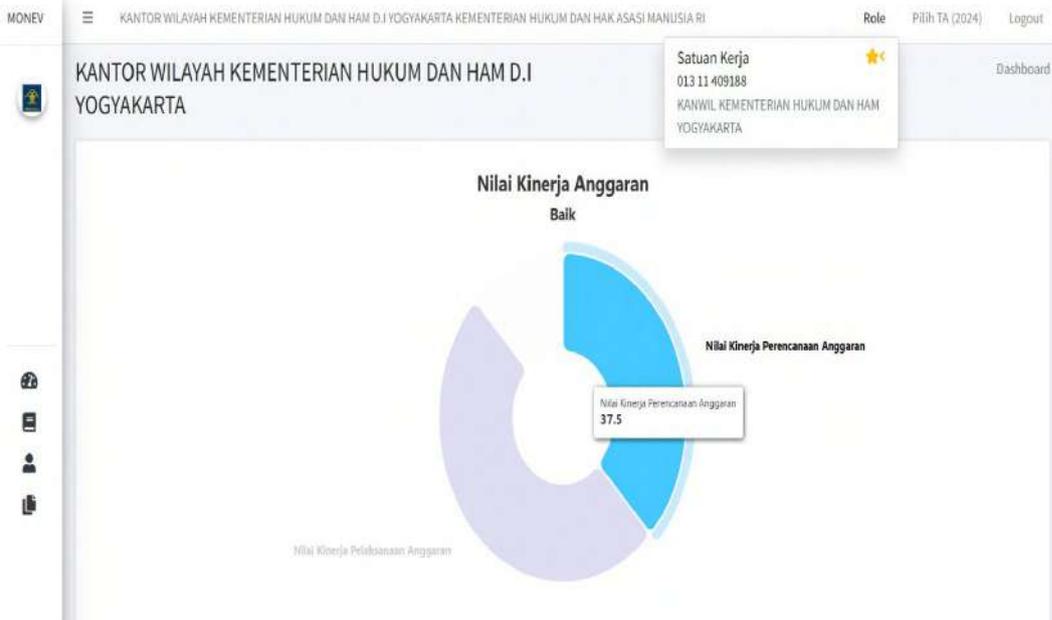
Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan wilayah masing-masing. Tahap penyusunan tim kerja dan tim asesor masing-masing	√												
Melakukan pendampingan pengunggahan data dukung kepada tim kerja masing-masing instansi yang sudah disusun dalam penilaian mandiri pelaksanaan IRH pada Pemerintah Daerah			√	√	√								
Tim Sekretariat Wilayah melakukan verifikasi dengan mengisi Lembar Kontrol tiap tahapan variabel masing-masing instansi daerah dan diserahkan ke Tim Sekretariat Nasional sebagai laporan. Dalam melakukan verifikasi awal data dukung tersebut dimaksudkan untuk melihat kelengkapan dan relevansi data dukung. Jika data dukung masih belum lengkap maka Tim Sekretariat Wilayah dapat meminta tim kerja dan tim asesor untuk melengkapinya. Jika sudah lengkap tim kerja mengunggah data dukung ke aplikasi IRH						√							
Tim Sekretariat Wilayah melakukan klarifikasi kepada tim kerja dan tim asesor instansi. Dalam hal terdapat gap atau perbedaan nilai mandiri dan nilai awal Pemerintah Daerah dapat melakukan klarifikasi													

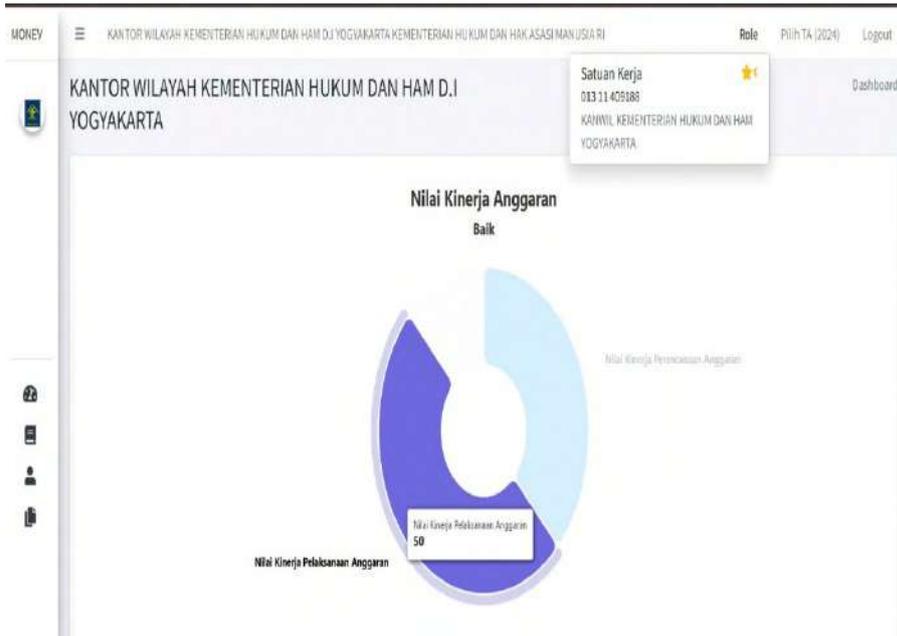
5. Diseminasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah

<p>kepada Tim Sekretariat Wilayah. Hasil Klarifikasi tersebut menjadi bahan pembahasan dalam kegiatan forum yang diselenggarakan oleh Tim Sekretariat Nasional</p>								√						
<p>Mengawasi tim assessor mengunggah berita acara yang sudah ditandatangani timessesor ke tim penilai nasional</p>										√				
<p>Penetapan hasil penilaian oleh Menteri Hukum dan HAM RI pada bulan Desember 2024 dengan hasil Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan Terbaik III dengan kategori Satker Kecil dan Pemerintah Propinsi Daerah DIY mendapatkan terbaik I secara nasional.</p>													√	
<p>Pembentukan SK Tim Diseminasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan HAM di Wilayah melalui Diskusi Strategi Kebijakan</p>												√		
<p>Penyusunan KAK Diseminasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan HAM di Wilayah melalui Diskusi Strategi Kebijakan</p>												√		
<p>Melaksanakan Kegiatan Diseminasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan HAM di Wilayah melalui Diskusi Strategi Kebijakan dengan narasumber Direktur Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia</p>														

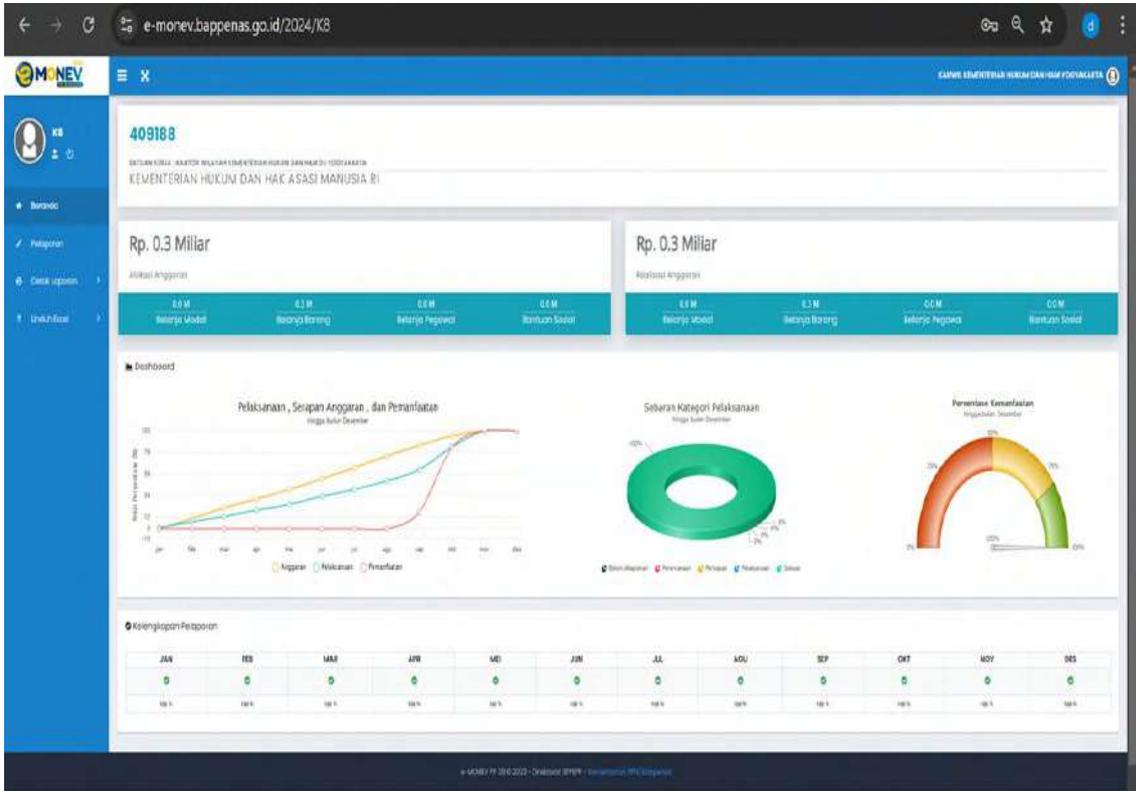


# Matrik Capaian SMART





## Matrik Capaian Monev Bappenas



### ***Pelaksanaan Capaian Kinerja Sub Bidang Pemajuan HAM***

Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM dilaksanakan Koordinasi Identifikasi Rancangan Perundang-Undangan Berbasis HAM di Wilayah Tahun 2024.



Kegiatan Pelayanan Publik Berbasis HAM

### ***Diseminasi Pelayanan Publik Berbasis HAM di Lingkungan Pemda DIY TA 2024***

Dilaksanakan koordinasi terkait Persiapan Pengumpulan dan Pendampingan Kabupaten/ Kota Peduli HAM Tahun 2024.



### ***Rapat Evaluasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM***

Dilakukan mediasi dan diperoleh penyelesaian pengaduan penanganan dugaan pelanggaran HAM yang dilaporkan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY.



Kegiatan di wisma tamu ndalem pengayoman

Telah dilaksanakan Acara Puncak Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke- 76 dengan tema “Harmoni Dalam Keberagaman Menuju Indonesia Emas 2045” dan koordinasi dan konsultasi terkait tugas dan fungsi Subbid Pemajuan HAM Tahun 2025 di Taman Mini Indonesia Indah dan di Direkrotat Jenderal Hak Asasi Manusia Kemenkumham RI





Kegiatan Hari HAM Sedunia

### ***Capaian Kinerja Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual***

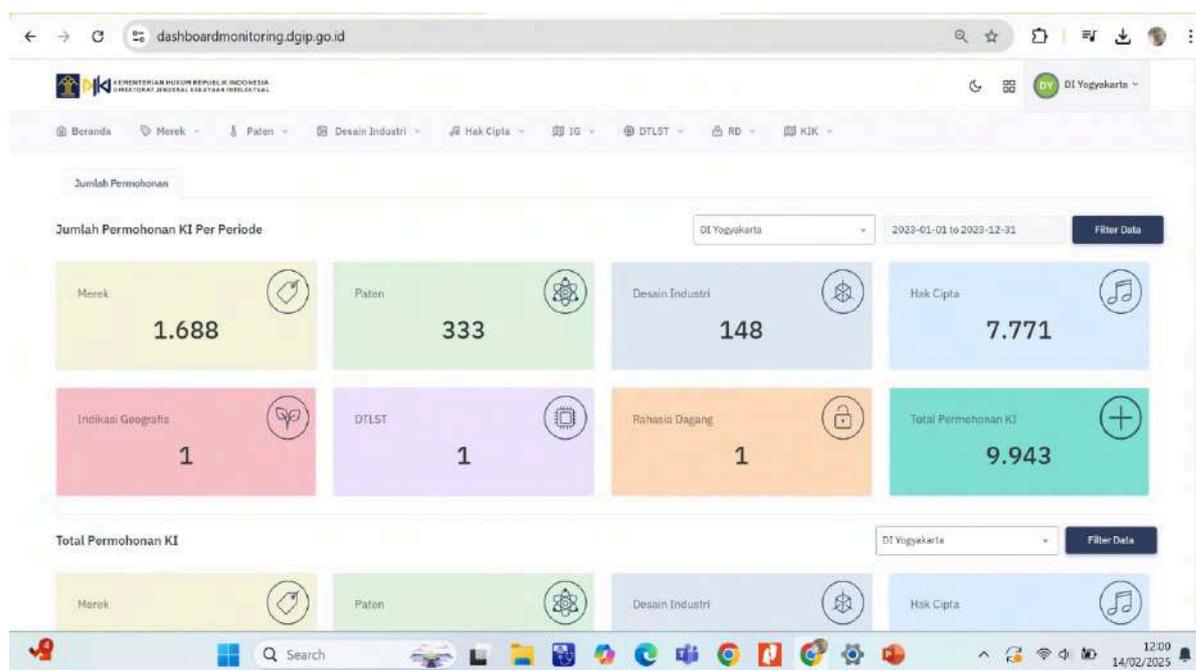
Berikut ini adalah hasil yang dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Terselenggaranya koordinasi ke DJKI;
2. Terselenggaranya kegiatan *Patent One Stop Service (POSS)*;
3. Terselenggaranya kegiatan Workshop Kekayaan Intelektual tentang Indikasi Geografis, dengan tema; *"Mendorong Produk Lokal Berdaya Saing Global"*;
4. Terselenggaranya kegiatan *Action Plan* Indikasi Geografis Tahun Anggaran 2024;
5. Terselenggaranya sosialisasi tentang kekayaan intelektual yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman;
6. Terselenggaranya penanganan aduan tentang pelanggaran kekayaan intelektual dari Ikatan Keluarga Minang;
7. Penerimaan kunjungan kepada instansi terkait dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
8. Terselenggaranya layanan pendaftaran dan konsultasi kekayaan intelektual bertempat di Jogja City Mall, Sleman;
9. Terselenggaranya layanan pendaftaran dan konsultasi kekayaan intelektual bertempat di lapangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

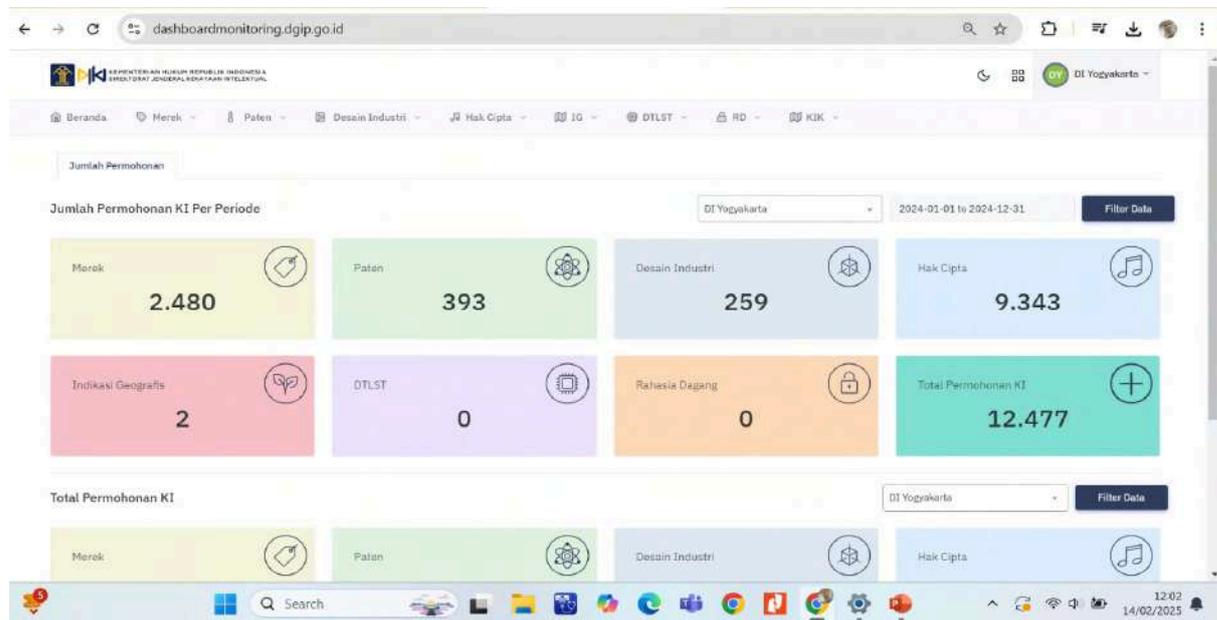
Perbandingan permohonan Kekayaan Intelektual pada Tahun 2023 total permohonan KI sejumlah 9.943 dan Tahun 2024 total permohonan KI sejumlah 12.477 selama 2 (dua) Tahun ini. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman masyarakat di Propinsi DIY tentang Kekayaan Intelektual meningkat.

Tahun	Permohonan Merek	Permohonan Paten	Permohonan Desain Industri	Permohonan Hak Cipta	Permohonan Indikasi Geografis
2023	1.688	333	148	7.771	1
2024	2.480	393	259	9.343	2

### Permohonan KI Tahun 2023



## Permohonan KI Tahun 2023



### ***Workshop Kekayaan Intelektual tentang Indikasi Geografis, dengan tema; "Mendorong Produk Lokal Berdaya Saing Global"***

Workshop ini diikuti oleh 100 orang peserta dari berbagai instansi terkait, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Dinas Koperasi dan UMKM, akademisi, pelaku UMKM, dan berbagai Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis.

Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham DIY, Yustina Elistya Dewi, selaku Ketua Panitia berharap kegiatan ini dapat mendorong peserta dalam mendaftarkan produk unggulan daerah dan memberikan pemahaman lebih terkait Indikasi Geografis. Kepala Kantor Wilayah berharap dengan adanya kegiatan hari ini semakin banyak potensi IG yang bisa mendapatkan sertifikat IG. Saat ini di DIY sudah ada 3 yang mendapatkan sertifikat IG yakni :

1. Batik Nitik Bantul, Salak Pondoh Sleman;
2. Gula Kelapa Kulon Progo;

3. Ada 3 (tiga) potensi IG yakni Gerabah kasongan, Kopi robusta Merapi, dan Jambu Dalhari.



### ***DJKI-Kemenkumham DIY Selenggarakan Layanan Paten Terpadu bagi Perguruan Tinggi***

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) bersama Kanwil Kemenkumham DIY sediakan Layanan Paten Terpadu (Patent One Stop Service) untuk membantu Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang), dan pelaku usaha dalam mengajukan paten. Layanan ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses pendaftaran paten, serta meningkatkan jumlah paten di DIY.





Gedung Pascasarjana UNY

### ***Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal***

Kegiatan Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal dengan tema “Optimalisasi Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Daerah dan Pelestarian Budaya”

Dihadiri oleh berbagai peserta yang berjumlah 100 orang yang terdiri dari, Paniradya Kaistimewan, Dinas Kebudayaan se-DIY, Dinas Pariwisata Se- DIY, Bappeda di DIY, Pengajar dan Siswa SMK Seni di DIY, Akademisi dan Mahasiswa Perguruan Tinggi di DIY, Sentra KI di DIY, dan Paguyuban Seni Budaya DIY. "Melalui kegiatan ini, kami berharap masyarakat dapat memahami nilai dan manfaat KIK, serta termotivasi untuk mendaftarkan KIK yang mereka miliki,"



### ***Kemenkumham DIY Gelar Layanan Pendaftaran Merek dan Hak Cipta di Ambarrukmo Plaza***

Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kemudahan akses terhadap perlindungan kekayaan intelektual, Kanwil Kemenkumham DIY menyelenggarakan kegiatan konsultasi dan pendaftaran Merek, Paten, Desain Industri, dan Hak Cipta.

pelaku usaha dan masyarakat umum untuk mendapatkan konsultasi langsung mengenai pendaftaran Merek, Paten, Desain Industri, serta Hak Cipta. "para pengunjung dapat memperoleh informasi terkini melalui brosur, leaflet, dan pamflet yang disediakan.



### ***Kegiatan Diseminasi Desain Industri Tahun Anggaran 2024***

Kemenkumham DIY bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menyelenggarakan acara Penguatan Pemahaman dan Konsultasi Teknis Pendaftaran Desain Industri, "Kolaborasi ini diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan desain industri, serta untuk memberikan pendampingan dan konsultasi kepada para pelaku usaha dalam proses pendaftaran desain industri,

"Desain industri dapat meningkatkan nilai tambah produk dan daya saing produk di pasaran. Alhamdulillah, selama 3 (tiga) tahun terakhir, tingkat pendaftaran desain industri di DIY semakin meningkat,"



***Kegiatan Edukasi Kekayaan Intelektual dalam rangkaian acara Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024***

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada para pelaku usaha dan ekonomi kreatif tentang pentingnya melindungi desain industri dan merek mereka. Kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong para pelaku usaha untuk mendaftarkan desain industri dan merek mereka ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). pelaku usaha nantinya mampu memahami pentingnya mendaftarkan desain industri. Sehingga semoga dapat memaksimalkan komersialisasi dari produk yang dihasilkan.



Rapat Koordinasi Teknis Kinerja Tahun 2024 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 dengan tema “Ekosistem Kekayaan Intelektual Mendorong Transformasi Ekonomi Nasional yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang dirangkai dengan kegiatan Festival Kekayaan Intelektual 2024



Pembahasan hasil evaluasi yang di capai dalam peaksanaan kegiatan Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual

1. Terselenggaranya kegiatan diseminasi mengenai kegiatan evaluasi dan optimalisasi kinerja penegakan hukum bidang kekayaan intelektual, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan tema: “Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual”;
2. Terselenggaranya kegiatan layanan *on the spot* berupa konsultasi dan pendaftaran kekayaan intelektual meliputi merek, hak cipta, paten, desain industri, dan indikasi geografis, dll. Layanan konsultasi tentang Kekayaan Intelektual tersebut menerima konsultasi dari masyarakat umum;
3. Terselenggaranya sosialisasi di Bidang Kekayaan Intelektual yang diselenggarakan atas undangan dari dinas dan instansi.

### III. DIVISI PEMASYARAKATAN

Mewujudkan Petugas UPT Pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif (PASTI) merupakan tujuan dari dilaksanakannya kegiatan pembinaan dan pengendalian serta pengawasan UPT Pemasyarakatan. Oleh sebab itu untuk merealisasikan rencana dimaksud Divisi Pemasyarakatan melaksanakan berbagai kegiatan. Hal ini sebagaimana fungsi Divisi Pemasyarakatan yakni, Pembinaan dan pengendalian tugas teknis di bidang bimbingan pemasyarakatan, pengentasan anak, informasi dan komunikasi, keamanan, kesehatan, dan perawatan narapidana/tahanan, serta pengelolaan benda siataan dan barang rampasan negara; Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbingan pemasyarakatan, pengentasan anak, informasi dan komunikasi, keamanan, kesehatan, dan perawatan narapidana/tahanan, serta pengelolaan benda siataan dan barang rampasan negara; Penyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasyarakatan; Pegkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber Daya Manusia, sarana, dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan unit pelaksana teknis pemasyarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 30 Tahun 2018, Divisi Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Wilayah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Divisi Pemasyarakatan berfungsi :

- a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbingan pemasyarakatan, pengentasan anak, informasi dan komunikasi, keamanan, kesehatan, dan perawatan narapidana/tahanan, serta pengelolaan benda dan barang rampasan negara;
- b. Pelaksanaan kerjasama, pemantauan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbingan pemasyarakatan, pengentasan anak, informasi dan komunikasi, keamanan, kesehatan, dan perawatan narapidana/tahanan, serta pengelolaan benda siataan dan barang rampasan negara;
- c. Penyusun rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasyarakatan dan;
- d. Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan, pengelolaan sumber daya

manusia, sarana dan prasarana serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan, berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta membawahi 15 UPT Pemasarakatan yang terdiri dari : 4 Lapas, 4 Rutan, 1 LPKA, 2 Bapas, dan 4 Rupbasan. Kapasitas Lapas/Rutan se-Daerah Istimewa Yogyakarta : 2.164 orang. Isi Lapas/Rutan pada tanggal 31 Desember 2024 sejumlah 2.404 orang, terdiri dari :

**Jumlah Tahanan dan Narapidana ;**

1. Tahanan dan Narapidana Perempuan : 221 orang
2. Tahanan dan Narapidana Anak : 14 orang
3. Tahanan dan Narapidana Lansia : 53 orang

Selama tahun 2024, Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham DIY, memberikan layanan pemasarakatan kepada masyarakat dalam bentuk usulan pemberian PB, CB, CMB, dan Asimilasi, sebagai hak warga binaan pemasarakatan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Data Jumlah Integrasi UPT Pemasarakatan

No	Program Reintegrasi	Jumlah	Keterangan
1	PB	96	
2	CMB	0	
3	CB	185	
4	Asimilasi	0	
5	CMK	0	

Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS Khusus Lapas/LPKA/Rutan Wilayah DIY dengan rincian:

Pimpinan Tinggi Pratama melaksanakan pemantauan secara langsung di TPS Lokasi Khusus Lapas/LPKA/Rutan. Kepala Kanwil Kemenkumham DIY melakukan pemantauan di Rutan Kelas IIB Bantul, Rutan Kelas IIA Yogyakarta, dan Lapas Kelas IIA Yogyakarta, Kepala Divisi Pemasarakatan memantau di UPT Lapas, LPKA & LPP wilayah Wonosari, Kepala Divisi Administrasi di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta, dan Kepala Divisi Keimigrasian di Lapas Kelas IIA Yogyakarta.

Seluruhnya akan mengikuti pemungutan di 11 Tempat Pemungutan Suara (TPS) Lokasi Khusus yang tersebar di seluruh Lapas-Rutan.

Data Jumlah Pemilu Tahun 2024 Narapidana UPT Pemasarakatan

No	Program Reintegrasi	Jumlah	Keterangan
1	WBP	2.324	
2	Pegawai	236	
	Jumlah Pemilih	2.560	



Giat Pemilu di UPT

### **Data Jumlah Penerima Remisi Hari Besar Keagamaan Tahun 2024 Narapidana UPT Pemasarakatan**

Kepala Kanwil Kemenkumham DIY Agung Rektono Seto menyampaikan bahwa pemberian remisi khusus merupakan bagian dari implementasi peningkatan penyelenggaraan layanan pemsarakatan dalam rangka pemenuhan hak-hak narapidana dan anak di Lapas/Rutan/LPKA khususnya wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemberian remisi merupakan wujud nyata dari sikap negara sebagai reward kepada narapidana dan anak binaan yang selalu berusaha berbuat baik, memperbaiki diri dan nantinya dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna

No	Hari Besar Keagamaan	Jumlah Penerima	Keterangan
1	Hari Raya Idul Fitri	1.313	
2	Hari Raya waisak	9	
3	Hari Raya Natal	111	

Pemberian remisi khusus pada Hari Raya Idul



Pemberian remisi khusus pada Hari Raya Waisak



Pemberian Remisi Khusus Hari Raya Natal Tahun 2024



Peningkatan terlaksananya capaian kinerja Sub Bidang Pelayanan Tahanan Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi

1. Tersediannya tempat baru rehabilitasi di Lapas Narkotika Yogyakarta dihadiri dari instansi pemerintah dan instansi terkait diantaranya: Pimti Pratama Kanwil DIY, BNNP DIY, BNNK Sleman, IKAI, Rektor UII Pimpinan Gereja Kaliurang peserta rehabilitasi sosial berjumlah 150 WBP Lapas Narkotika;
2. Terlaksananya Sosialisasi Teknis terkait Pelayanan Kesehatan (pencegahan & penanggulangan penyakit menular) dan Rehabilitasi yang dilaksanakan di Hotel Merapi Merbabu;
3. Terlaksananya Evaluasi dan Penguatan Kapasitas Operator Yantahwatkeslab yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan dukungan *Global Fund*.



Pembukaan program rehabilitasi di Lapas Narkotika Yogyakarta

Inovasi penilaian rehabilitasi Pemasyarakatan merupakan langkah konkrit dalam menyelenggarakan rehabilitasi sosial sehingga seluruh kegiatan dari awal hingga akhir memiliki evaluasi/controling yang tepat. Inovasi ini terdapat 3 komponen meliputi:

1. Penilaian pelaksanaan rehabilitasi kepada WBP
2. Penilaian pelaksanaan rehabilitasi terkait kualitas konselor
3. Penilaian dan saran kepada WBP melalui assesment

Layanan Kesehatan dan rehabilitasi merupakan salah satu layanan dalam penyelenggaraan pemasyarakatan yang harus dipenuhi untuk memulihkan dan mempertahankan kondisi kesehatan serta untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas hidup tahanan maupun warga binaan Pemasyarakatan, sekaligus mempersiapkan warga binaan untuk dapat menjalankan fungsi dengan baik di lingkungan Masyarakat.

Kanwil Kemenkumham DIY menghadirkan narasumber yang berkompeten, salah satunya Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi, Elly Yuzar. Narasumber dari eksternal Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi DIY serta Yayasan Vesta Indonesia yang bergerak di bidang Pencegahan dan Penanggulangan IMS, HIV dan AIDS di Yogyakarta.



Sosialisasi Teknis terkait Pelayanan Kesehatan

#### IV. DIVISI KEIMIGRASIAN

Divisi Keimigrasian mempunyai fungsi pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang lalu lintas keimigrasian, ijin tinggal, dan status keimigrasian serta penindakan keimigrasian dan rumah detensi imigrasi; Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang lalu lintas keimigrasian, ijin tinggal, dan status keimigrasian serta penindakan keimigrasian dan rumah detensi imigrasi; Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian; dan Pengorganisasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksanaan Teknis Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi. Untuk merealisasikan fungsi tersebut dan upaya pencapaian kinerja tahun 2024, Divisi Keimigrasian melaksanakan berbagai kegiatan yang sebelumnya sudah tercantum didalam perjanjian kinerja awal tahun 2024

*Kegiatan Divisi Keimigrasian yang telah dilaksanakan pada tahun 2024, diantaranya;*

No	Kegiatan	Waktu/tempat/ Peserta
1.	Pembinaan dan Pengendalian Layanan Penerbitan Paspor di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kulonprogo, Mal Pelayanan Publik Kota Yogya dan Unit Layanan Paspor Lippo Plaza Yogya I TPI Yogyakarta	MPP Kuloprogo, MPP Kota Yogya dan ULP Lippo Plaza Yogya  Rabu, 31 Januari 2024
2.	Koordinasi dan Konsultasi Direktorat Jenderal Imigrasi	Minggu – Rabu, 28 – 31 januari 2024
3.	Sosialisasi Paspor Elektronik	Kalurahan Demangrejo, Kalurahann Sogan  Senin, 15 Januari 2024

4.	Koordinasi dan Verifikasi Berkas Permohonan Izin Tinggal Keimigrasian	Kantor Kalurahan, Hargobinangun Selasa, 9 Januari 2024
5.	Koordinasi dan Edukasi Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural	Kantor Kalurahan Nomporejo Jumat, 12 Januari 2024
6.	Koordinasi dan Edukasi Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural	Kantor Kalurahan Banaran Kantor, Kalurahan Kranggan Senin, 22 Januari 2024
7.	Pengamatan dalam rangka pengumpulan data dan informasi intelijen keimigrasian di PT Ho Young Indonesia dan PT Java Glove	PT Ho Young Indonesia dan PT Java Glove 17 Januari 2024
8.	Pengamatan dalam rangka pengumpulan data dan informasi intelijen keimigrasian di PT Sinar Kencana Makmur Jaya dan PT GM Global Indonesia	PT Sinar Kencana Makmur Jaya dan PT GM Global Indonesia 24 Januari 2024
9.	pengamatan dalam rangka pengumpulan data dan informasi intelijen keimigrasian di Yayasan Selamat Pagi Korea dan PT B&G (Royal Premium Syrup)	Yayasan Selamat Pagi Korea dan PT B&G; Divisi Imigrasi dan Petugas Kemenag. 25 Januari 2024
10.	Penindakan administrasi keimigrasian atau projustisia	Nama : Mia Van Der Torren Asal : Belanda
11.	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Layanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta	Kanim Kelas I TPI Yogyakarta Selasa, 20 Februari 2024
12.	Koordinasi dan Konsultasi pada Direktorat Jenderal Imigrasi	Kamis-Sabtu, 22-24 Februari 2024

13.	Koordinasi dengan Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang	Semarang Jumat-Sabtu, 17-18 Februari
14.	Edukasi Pelaporan Orang Asing yang Menginap	Hills House, Radika Cottage, Casa Coco Hotel Senin, 5 Februari 2024
15.	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Layanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta	Kanim Kelas I TPI Yogyakarta Selasa, 20 Februari 2024
16.	Pengamatan dalam rangka pengumpulan data dan informasi intelijen keimigrasian di PT Sukses Jinyoung dan PT PIA Juwara Satoe	PT Sukses Jinyoung dan PT PIA Juwara Satoe 21 Februari 2024
17.	Sosialisasi Paspor Elektronik	Kalurahan Pandowan, kal.Jatirejo, Kal. Tirtorahayu, Kal. Wahyuharjo  Kamis, 14 maret 2024
18.	Pengamatan dalam rangka pengumpulan data dan informasi intelijen keimigrasian di LPK Hotaru, Jerman Schule, Inovedu Jogja	LPK Hotaru, Jerman Schule, Inovedu Jogja 22 Maret 2024
19.	Penindakan administrasi keimigrasian atau projustisia	Nama: Dwight Jeriko, Funelas Peren Asal : Filipina
20.	Sosialisasi dalam rangka pelaksanaan Rencan Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan isu permasalahan perluasan layanan e-paspor	Sekolah Mutiara Persada  28 Maret 2024
21.	kegiatan Pembinaan, pengendalian, pengawasan pelaksanaan di Pelayanan Eazy Passport Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta di UII Yogyakarta	Pelayanan Eazy Passport Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Yogyakarta di UII Yogyakarta 30 April 2024

22.	Pengamatan dalam rangka pengumpulan data dan informasi intelijen keimigrasian di LPK Megumi dan PT Korean First	LPK Megumi dan PT Korean First 26 April 2024
23.	Kegiatan tindakan administratif keimigrasian atau projustisia	Nama : Jong Bok Park Asal : Korea Selatan  TAK : Deportasi
24.	Sosialisasi dalam rangka pelaksanaan Rencan Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan isu permasalahan perluasan layanan e-paspor di seluruh Kantor Imigrasi	SMKN 1 Sewon 7 Mei 2024
25.	Koordinasi dan Konsultasi ke Direktorat Jenderal Imigrasi	Direktorat Jenderal Imigrasi  15-17 Mei 2024
26.	Pengamatan dalam rangka operasi mandiri pengawasan orang asing	PT. KINI  8 Mei 2024
27.	kegiatan tindakan administratif keimigrasian atau projustisia	Nama : Yang Sheng Xiang Asal : Taiwan TAK : Deportasi

28.	Melaksanakan kegiatan operasi gabungan Timpora tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di LPK di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman	di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman 28 Mei 2024
29.	Sosialisasi Layanan Keimigrasian	Kelurahan Wukirsari 13 Juni 2024
30.	Melaksanakan kegiatan Pra Penyidikan di PT SUNG CHANG dan PT EPOTEC	Di PT SUNG CHANG dan PT EPOTEC 26 Juni 2024
31.	Monitoring Dan Evaluasi Bidang Inteldakinsarkomkim	Pada hari, Selasa, 10 Oktober 2017 bertempat di Aula Kanim Yogyakarta d/a Jln.Solo Km.10, Maguwoharjo, Yogyakarta, Peserta; Divisi
32.	Pengamatan dalam rangka pengumpulan data dan informasi intelijen keimigrasian di PT LEZAX NESIA, dan PT INDO MERAPI	di PT LEZAX NESIA, dan PT INDO MERAPI 10 Juni 2024
33.	Koordinasi dengan Pemerintah Daerah/instansi lain terkait izin tinggal keimigrasian, Perkawinan Campuran dan Anak Berkewarganegaraan Ganda serta pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural	Kalurahan Tamanmartani dan Kalurahan Jogotirto 2 Juli 2024
34.	Koordinasi dan Konsultasi ke Direktorat Jenderal Imigrasi	Direktorat Jenderal Imigrasi 17-19 Juli 2024

35.	Pengamatan dalam rangka pengumpulan data dan informasi intelijen keimigrasian di Anugerah Mulya Sentosa, Homestay Griya Mataram, Anugerah Mulya Indobel	di Anugerah Mulya Sentosa, Homestay Griya Mataram, Anugerah Mulya Indobel 12 Juli 2024
36.	Pemantauan dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen dan penindakan keimigrasian di PT Doodex Jaya Makmur dan PT APROVIS	PT Doodex Jaya Makmur dan PT APROVIS 30 Juli 2024
37.	Edukasi pelaporan tamu Orang Asing di penginapan	Hotel Ros-In Yogya dan Ada Waktu Homestay 5 Agustus 2024
38.	Edukasi pelaporan tamu Orang Asing di penginapan	Ndalem Agung Palagan, Rumah Palagan Homestay dan Embe Omah Asri Homestay 16 Agustus 2024
39.	Pemantauan dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis bidang intelijen dan penindakan keimigrasian di Bandara YIA	di Bandara YIA 13 Agustus 2024
40.	kegiatan tindakan administratif keimigrasian atau projustisia	Nama : Imad Osman Sharif Asal : Irak  TAK: Mengganggu Ketertiban Umum
41.	kegiatan Pembinaan, pengendalian, pengawasan pelaksanaan tugas teknis di UPT	MPP Kabupaten Kulonprogo dan ULP Lippo Plaza Jogja 3 September 2024

42.	Koordinasi dengan Pemerintah Daerah/instansi lain terkait izin tinggal keimigrasian, Perkawinan Campuran dan Anak Berkewarganegaraan	SMKN 1 Bantul, SMKN 1 Sedayu dan Kantor Kalurahan Argosari  18 September 2024
43.	Melaksanakan kegiatan pengamatan dalam rangka operasi mandiri pengawasan orang asing di PT Global Jet Express dan PT Tirta Prima Persada	di PT Global Jet Express dan PT Tirta Prima Persada  9 September 2024
44.	kegiatan tindakan administratif keimigrasian atau projustisia	Nama : Paul Michael Sperling Asal : USA  TAK: Detensi
45.	Koordinasi data WNA dan sosialisasi dengan Pemerintah Daerah/instansi lain terkait izin tinggal keimigrasian, Perkawinan Campuran dan Anak Berkewarganegaraan Ganda serta pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural	Kantor Kalurahan Nglipar dan SMKN 1 Nglipar  Kamis, 3 Oktober 2024
46.	Koordinasi dan Sosialisasi dengan pengelola atau pemilik penginapan dalam rangka edukasi pelaporan dan pengawasan Orang Asing	Rumput Resort, Cornel Homestay 29 Oktober 2024
47.	melaksanakan kegiatan Pembinaan, pengendalian, pengawasan	MPP Kabupaten Kulonprogo dan UKK Kabupaten Kulonprogo  8 November 2024
48.	Pelaksanaan Pengumpulan Data dan Informasi (Puldatin)	PT Jalur Mandiri Utama PT Doodex 3 Desember 2024

Dalam rangka tindak lanjut surat Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-GR.01.01- 0703 Tanggal 19 September 2022 Hal Tata Cara Pengelolaan Hak Akses Layanan Izin Tinggal Keimigrasian tersebut, Kepala Divisi Keimigrasian telah mengirimkan surat Nomor: W14-GR.01.01-7907 Tanggal 20 September 2022 Hal Penyerahan Hak Akses Layanan Izin Tinggal Keimigrasian Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham DIY.

Pelaksanaan kegiatan Non DIPA yang dilaksanakan pada Subbidang Informasi Keimigrasian adalah sebagai berikut :

1. Penyajian Data dan Informasi terkait layanan keimigrasian pada Kantor Imigrasi kelas I TPI Yogyakarta Tahun 2024 berikut :

Statistik Layanan Kanim Yogyakarta Tahun 2024

BULAN	PENERBITAN PASPOR			DATA PERLINTASAN				PENINDAKAN KEIMIGRASIAN		IZIN TINGGAL			
	24 HAL	48 HAL	ELEKTRONIK	WNI	WNA	WNI	WNA	TAK	PRO JUSTITIA	ITK	ITAS	ITAP	AFFIDAVIT
JANUARI	16	11992	2854	13027	6560	13517	6581	3	0	22	76	15	10
FEBRUARI	1	4571	1295	6787	4595	7452	3930	0	0	35	54	5	13
MARET	3	3677	1696	10518	5930	8789	6268	2	0	30	38	11	14
APRIL	2	1999	1943	12574	5359	11868	4038	1	0	8	11	6	15
MEI	1	2760	2602	7851	10902	9687	9335	2	0	15	29	6	24
JUNI	8	2770	2398	6790	6988	6906	3145	0	0	8	39	9	10
JULI	6	4455	3045	6062	10886	7107	8485	0	0	5	99	10	26
AGUSTUS	13	3765	2501	6201	9857	6476	7912	0	0	7	95	2	17
SEPTEMBER	19	3294	2108	6068	9377	6078	8632	2	0	4	61	2	16
OKTOBER													
NOVEMBER													
DESEMBER													
<b>JUMLAH</b>	<b>69</b>	<b>39283</b>	<b>20442</b>	<b>75878</b>	<b>70454</b>	<b>77880</b>	<b>58326</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>134</b>	<b>502</b>	<b>66</b>	<b>145</b>
<b>TOTAL</b>	<b>59794</b>			<b>282538</b>				<b>10</b>		<b>847</b>			

2. Pengelolaan kesisteman pada Divisi Keimigrasian

Monitoring dan perawatan perangkat Sistem Informasi Keimigrasian (SIMKIM) dan Server SIMKIM yang ada di Divisi Keimigrasian, dengan kondisi Baik tidak ada kendala.

3. Adapun jumlah layanan izin tinggal keimigrasian yang dilakukan dengan menggunakan hak akses Kepala Divisi Keimigrasian yang telah dilaporkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Periode Januari s/d Maret 2024

BULAN	JENIS LAYANAN											
	PERPANJANGAN					ALIH STATUS		PEMBERIAN ITAP	ALIH PENJAMIN	RANGKAP JABATAN	DUPLIKAT KITAP	SKIM
	ITAS 1 TH	ITAS 2 TH	ITAP	ITK NEGARA RAWAN	ITAS NEGARA RAWAN	ITK-ITAS	ITAS-ITAP					
JANUARI	9	3	6	0	0	2	10	0	1	0	0	0
FEBRUARI	7	1	2	0	0	4	3	2	0	0	0	0
MARET	7	0	6	0	0	1	7	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Periode April s/d Juni 2024

BULAN	JENIS LAYANAN											
	PERPANJANGAN					ALIH STATUS		PEMBERIAN ITAP	ALIH PENJAMIN	RANGKAP JABATAN	DUPLIKAT KITAP	SKIM
	ITAS 1 TH	ITAS 2 TH	ITAP	ITK NEGARA RAWAN	ITAS NEGARA RAWAN	ITK-ITAS	ITAS-ITAP					
JANUARI	15	0	1	0	0	4	3	0	0	0	1	0
FEBRUARI	7	0	1	0	0	1	4	0	0	0	0	0
MARET	19	0	6	0	0	2	8	0	0	0	0	1
APRIL	4	0	3	0	0	6	2	0	0	0	0	0
MEI	7	2	1	0	1	1	6	0	0	0	1	0
JUNI	0	3	3	0	0	5	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>52</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

Periode 31 Desember 2024

BULAN	JENIS LAYANAN																							
	PENERBITAN PASPOR			DATA PERLINTASAN				IZIN TINGGAL																
				KEDATANGAN		KEBERANGKATAN																		
	24 HAL	48 HAL BIASA	48 HAL ELEKTRONIK	WNI	WNA	WNI	WNA	ITK			ITAS			ITAP			AFFIDAVIT	SKIM	Pendaftaran ABG	VOA	MERP	KARTU FASKIM		
								baru	perpanjangan	altus	baru	perpanjangan	altus	baru	perpanjangan	altus	Pelaporan 1	duplikat						
JANUARI	16	11992	2854	13027	6560	13517	6581	0	22	0	6	68	2	0	5	7	3	0	0	0	5	65	30	5
FEBRUARI	1	4571	1295	6787	4595	7452	3930	0	34	0	1	52	1	0	1	3	1	0	0	0	9	126	22	4
MARET	3	3677	1696	10518	5930	8789	6268	0	30	0	1	37	0	0	5	2	4	0	0	0	9	63	29	5
APRIL	2	1999	1943	12574	5359	11868	4038	0	8	0	1	10	0	0	1	2	3	0	0	0	11	69	27	4
MEI	1	2760	2602	7851	10902	9687	9335	0	15	0	0	28	1	0	2	0	4	0	0	0	12	76	27	12
JUNI	8	2770	2398	6790	6988	6906	3145	0	8	0	0	39	0	0	4	2	2	1	0	0	8	50	16	2
JULI	6	4455	3045	6062	10896	7107	8491	0	5	0	4	95	0	0	7	1	2	0	0	0	16	60	29	10
AGUSTUS	13	3765	2501	6201	9857	6476	7912	0	7	0	0	91	4	0	1	0	1	0	0	0	9	52	15	8
SEPTEMBER	19	3294	2108	6068	9377	6078	8632	0	4	0	0	61	0	0	0	1	1	0	0	0	8	39	13	8
OKTOBER	4	3301	3567	7541	6982	7390	6020	0	5	0	0	44	0	0	1	3	2	0	0	0	5	34	21	11
NOVEMBER	4	2908	4163	6959	6360	5984	6466	0	6	0	1	30	0	0	2	0	3	1	0	1	1	37	8	0
DESEMBER	56	2939	4131	8486	6386	8073	6702	0	3	0	0	39	0	0	3	1	4	0	0	0	5	20	13	2
<b>TOTAL</b>	<b>133</b>	<b>48431</b>	<b>32303</b>	<b>98864</b>	<b>90192</b>	<b>99327</b>	<b>77520</b>	<b>0</b>	<b>147</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>594</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>22</b>	<b>30</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>98</b>	<b>691</b>	<b>250</b>	<b>71</b>

4. Pengelolaan data atau Arsip Persuratan yang terhimpun selama Tahun 2024 sebagai berikut :

Periode bulan April s/d Juni 2024

Arsip	April	Mei	Juni
Surat Masuk	12	22	44
Surat Keluar	0	0	3
Nota Dinas Masuk	16	18	15
Nota Dinas Keluar	1	1	1
Jumlah	29	41	63

Periode bulan Juli s/d September 2024

Arsip	Juli	Agustus	September
Surat Masuk	41	16	17
Surat Keluar	-	-	7
Nota Dinas Masuk	23	14	8
Nota Dinas Keluar	6	3	-
Jumlah	70	33	32

5. Dalam monitoring pengelolaan aduan masyarakat oleh satuan kerja melalui website lapor.go.id dan media elektronik lainnya berupa surat elektronik/email;

jogja.imigrasi@gmail.com, Telepon Pengaduan nomor 0274-489165, WhatsApp pengaduan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta nomor 08112578223, kanal media sosial terdiri dari twitter : @imigrasijogja, Instagram : @imigrasi.jogja, facebook : imigrasijogja, kotak saran dan pengaduan, website WBS Inspektorat Jenderal, website Direktorat HAM : simasham.kemenkumham.go.id terkait pelanggaran HAM, website Kantor Imigrasi Yogyakarta : jogja.imigrasi.go.id serta inovasi berbasis web yang telah dikembangkan dalam pelayanan penanganan pengaduan masyarakat yaitu Aplikasi Sepakat Karyo (Aplikasi Helpdesk Penanganan Pengaduan Masyarakat Kantor Imigrasi Yogyakarta) melalui link <https://karyo.id/sepakatkaryo/>.

Telah dilaksanakan pengecekan laporan pengaduan, aspirasi atau permohonan informasi dari masyarakat pada Aplikasi SP4N LAPOR! Serta kanal pengaduan lainnya secara berkala di bulan **September 2024** tidak menerima aduan, aspirasi ataupun permohonan informasi atau **Nihil**.

6. Monitoring Penyebaran Informasi pada bulan September 2024 sebanyak 2.725 sedangkan bulan Desember sebanyak 3.356 penyebaran informasi melalui media informasi Satuan Kerja;

Penyebaran Informasi :

No	Media	Oktober	November	Desember
1.	Formulir (datang langsung & Telp	236	134	165
2.	Email	40	46	41
3.	Twitter	8	15	23
4.	Instagram	292	484	545
5.	WhatsApp Gateway	596	555	459
6.	WhatsApp	1458	1757	1769

	Layanan Informasi			
7	Google Maps/Google Busines	0	0	0
8.	LAPOR	0	0	0
9.	Live Chat Website	185	142	300
10.	Permohonan data Paspur lama	89	62	54
<b>Total</b>		<b>2904</b>	<b>3195</b>	<b>3356</b>

## A. Kegiatan Yang di Laksanakan

### 1. Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

- a. Tidak ada kegiatan Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan Pelaksanaan Tugas Teknis (Bindalwasnis) di UPT;
- b. Tidak ada pelaksanaan kegiatan Pembinaan, Pengendalian, Kerjasama dan Evaluasi Bidang Teknis Keimigrasian periode Desember 2024;
- c. Pelaksanaan Pengumpulan Data dan Informasi (Puldatin) dilaksanakan sejumlah satu kegiatan yang dilaksanakan sejumlah 17 (tujuh belas) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

NO	TANGGAL PELAKSANAAN	LOKASI
1	Senin, 2 Desember 2024	a. PT Java Agro Sari b. PT Eneral Kosmetika Biotech
2	Selasa, 3 Desember 2024	a. LPK Hikari b. PT Chalabi
3	Rabu, 4 Desember 2024	a. PT Kang San Indonesia b. Ponpes Zaid Bin Tsabit
4	Jumat, 6 Desember 2024	a. Ponpes Zaid Bin Tsabit b. Resto Baba Suhail
5	Sabtu, 07 Desember 2024	a. Losmen Krisna b. Penginapan Black House

		c. Losmen Kampung Candi
6	Senin, 09 Desember 2024	a. PT Jalur Mandiri Utama b. PT Doodex
7	Selasa, 10 Desember 2024	a. PT Komitrando Wonosari b. PT Hyemin Java Indonesia
8	Rabu, 11 Desember 2024	a. PT IGP Internasional b. LPK Nayaka Sumber Daya
9	Kamis, 12 Desember 2024	a. PT Bumyang Glove Perdana b. PT Jun Yeon Indonesia
10	Jumat, 13 Desember 2024	a. PT Heat Wahren Huis b. PT IDE Studio
11	Sabtu, 14 Desember 2024	a. Anugerah Wisata Hotel b. Penginapan Joglo Turi c. The Mangkoro Hotel
12	Senin, 16 Desember 2024	a. PT Hajma Aruna Java b. PT Plank Living Indonesia
13	Selasa, 17 Desember 2024	a. PT Toto Jongko Abadi Jaya b. PT Khotis Jawa Indonesia
14	Rabu, 18 Desember 2024	a. Resto Ganesha Eksankriti b. Mustika Yogyakarta Resort (Hotel Sheraton)
15	Kamis, 19 Desember 2024	a. PT SN Prengar Jaya b. PT Java Gloves Perdana c. PT Sinar Kencana Makmur Jaya d. PT Roma Export
16	Jumat, 20 Desember 2024	a. PT Lezax Nesia Jaya b. PT Gema Global Implnesia
17	Sabtu, 21 Desember 2024	a. Losmen Arga Jaya b. Hotel Gandung c. Villa Indi

d. Operasi Gabungan dilaksanakan sebanyak satu kali pada hari Kamis, 5 Desember 2024 dengan target operasi sebagai berikut:

- PT. Indoko Global Inc
- LPK Oyama Gakkue
- LPK ITB
- PT. Distrima Indonesia
- PT. Arana Homedeco
- PT. Maesindo Indonesia
- PT. Eagle Glove Indonesia
- PT. Busana Remaja Kalasan

e. Tidak ada kegiatan pra penyidikan yang dilakukan pada periode Desember 2024.

## 2. Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian

- a. Kegiatan Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan Pelaksanaan Tugas Teknis (Bindalwasnis) pada Unit Pelaksana Teknis dilaksanakan satu kali pada Selasa, 10 Desember 2024 di Yogyakarta International Airport dan Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Kulon Progo;
- b. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka verifikasi berkas permohonan perizinan keimigrasian, serta koordinasi dengan pengelola atau pemilik penginapan dalam rangka edukasi pelaporan dan pengawasan Orang Asing serta penyebaran informasi layanan keimigrasian lainnya dilaksanakan sejumlah lima kegiatan sebagai berikut;

NO	HARI/TANGGAL	TUJUAN
1.	Senin, 2 Desember 2024	a. SMK Negeri 1 Sanden b. SMK Muhammadiyah Kretek
2	Selasa, 3 Desember 2024	a. RedDoorz at Plemburan Jakal 2 b. Homestay Banua Raya c. Nano House Jogja d. Urbanview Hotel Kesuma Yogyakarta e. Hotel 88 f. JM Cabin
3	Rabu, 11 Desember 2024	a. Candi Tirto Raharjo Cottag b. Christina Guesthouse c. Rosseno Villa
4	Kamis, 12 Desember 2024	a. Tamu Capsule b. Palmier Kostel c. de Costel
5	Rabu, 18 Desember 2024	a. Wisma Luwes b. Villa Alifa c. OYO Pakemsari

- C. Koordinasi ke Direktorat Jenderal Imigrasi dilaksanakan sebanyak dua kali pada hari tanggal 16 -18 Desember 2024 dan 26 s.d. 29 Desember 2024.

## B. Data Pelaksanaan Tugas pada Satuan Kerja

### a) Intelijen Keimigrasian

No	Kegiatan	Jumlah
1	Penyelidikan Intelijen	3
2	Operasi Mandiri	9
3	Pengecekan Lapangan terhadap Permohonan Alih Status Izin Tinggal dan SKIM	0
4	Laporan Harian Intelijen	14
5	Timpora / Operasi Gabungan	0

### b) Penindakan Keimigrasian

NO	JENIS PENINDAKAN	JUMLAH
1	Pengawasan Pemulangan Crew/Awak Alat Angkut Tidak dengan Alat Angkutnya	0
2	Projustitia	0
3	TAK	
	Cekal	1
	Overstay	0
	Pembatalan Dokim/ intal	0
	Larangan di Wilayah tertentu	0
	Deportasi	1
	Detensi	1
	Denda	0
4	Exit Permit Only	0
5	Penangguhan Paspor	0
6	Pencabutan Penangguhan Paspor	0
7	BAP Paspor Hilang	71
8	BAP Paspor Rusak	28
9	BAP Perubahan Data	14

c) Layanan Penerbitan Paspor

24 HAL	BIASA 48 HAL	ELEKTRONIK 48 HAL
56	2939	4131
<b>TOTAL : 7126</b>		

d) Data Perlintasan

e) DATA KEDATANGAN							
PENUMPANG				CREW			
WNI		WNA		WNI		WNA	
L	P	L	P	L	P	L	P
3456	5030	3235	3140	0	0	9	2
JUMLAH: 14861				JUMLAH: 11			
<b>TOTAL : 14872</b>							
DATA KEBERANGKATAN							
PENUMPANG				CREW			
WNI		WNA		WNI		WNA	
L	P	L	P	L	P	L	P
3111	4962	3387	3304	0	0	9	2
JUMLAH: 14764				JUMLAH: 11			
<b>TOTAL : 14775</b>							

f) Pemberian Izin Tinggal dan layanan Keimigrasian Lainnya

ITK		ITAS		ITAP		AFFIDAVIT		ABG		SKIM		MRP		FASKIM		VOA	
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	0
1	2	20	19	7	1	0	0	2	3	0	0	4	9	0	2	13	7
3		39		8		0		5		0		13		2		20	

g) Informasi Keimigrasian

No	Jenis Layanan	Jumlah
1	Mutasi Alamat Keluar	2
2	Mutasi Alamat Masuk	1
3	Mutasi Alamat Lokal	10
4	EPO KITAP	0
5	Mutasi Paspor	12
6	EPO KITAS	13
7	REP Tidak Kembali (RTK)	15
8	Lapor Lahir WNA	0
9	Lapor Nikah	2
10	Lapor Perceraian	0
11	Lapor Wafat WNA	0
12	Pencabutan Dokim menjadi WNI	0
13	ABG memilih WNA	0

h) Pengelolaan Permohonan Informasi dan Komunikasi Pengaduan

No	Kegiatan	Jumlah
1	Formulir dan Telepon	165
2	Email	41
3	Twitter	23
4	Instagram	545
5	Whatsapp Gateway	459
6	Whatsapp Layanan Informasi	1769
7	Google Maps/ Google Bussines	0
8	LAPOR	0
9	Live Chat Website	300
10	Permohonan Data Paspor Lama	54

i) Publikasi dan Layanan Pengaduan

No	Kegiatan	Jumlah
1	Publikasi Media Cetak	1
2	Publikasi Media Online/Elektronik	13
3	Pengaduan	1

**Realisasi Anggaran di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY s.d Desember 2024 adalah:**

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	Rp92.691.498.000,-	Rp92.545.329.030,-	99,84%
Belanja Barang	Rp73.049.565.000,-	Rp72.589.759.793,-	99,37%
Belanja Modal	Rp5.798.000.000,-	Rp5.361.320.080,-	92,47%
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp171.539.063.000,-</b>	<b>Rp170.496.408.903,-</b>	<b>99,39%</b>

#### **A. Realisasi Anggaran Tahunan Tahun 2024**

Berdasarkan data dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 9 DIPA Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY dan 15 (Lima belas) UPT Pemasarakatan dan 1 (satu) UPT Imigrasi Tahun 2024 diperoleh data sebagai berikut:

1. Pagu : **Rp. 171.539.063.000,-**
2. Realisasi : **Rp. 170.496.408.903,-**
3. Prosentase : **99,39 %**

#### **B. Realisasi Anggaran Jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY Tahun 2024**

NO	SATKER	TOTAL BELANJA		
		PAGU	REALISASI	%
1	KEMENKUMHAM SEDJEN	26,868,934,000	26,788,548,527	99,70%
2	KMENKUMHAM BALITBANG KUMHAM	275,361,000	275,344,861	99,99%
3	KEMENKUMHAM DITJEN PAS	901,269,000	900,830,874	99,95%
4	KEMENKUMHAM DITJEN IMIGRASI	2,666,088,000	2,665,647,211	99,98%
5	KEMENKUMHAM BPHN	2,617,123,000	2,614,509,591	99,90%
6	KEMENKUMHAM DITJEN AHU	2,439,601,000	2,434,744,023	99,80%

7	KEMENKUMHAM ISTI DIJEN HKI	2,871,760,000	2,864,271,395	99.74%
8	KEMENKUMHAM DIJEN PP	520,000,000	519,998,842	100.00%
9	KEMENKUMHAM DIJEN HAM	239,895,000	233,990,668	97.54%
10	RUPBASAN KELAS I YOGYAKARTA	2,881,538,000	2,881,327,633	99.99%
11	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREM	7,615,006,000	7,613,044,358	99.97%
12	LAPAS KELAS II A NARKOTIKA YOGYAK	16,214,035,000	16,209,490,616	99.97%
13	RUTAN KELAS II B WONOSARI	8,426,991,000	8,423,260,441	99.96%
14	RUPBASAN KELAS II WATES	2,255,107,000	2,253,701,401	99.94%
15	BAPAS KELAS II WONOSARI	3,468,103,000	3,465,412,724	99.92%
16	BAPAS KELAS I YOGYAKARTA	8,245,060,000	8,237,374,079	99.91%
17	RUTAN KELAS II A YOGYAKARTA	9,008,134,000	8,998,385,125	99.89%
18	LAPAS KELAS II A YOGYAKARTA	15,824,628,000	15,801,724,814	99.86%
19	RUTAN KELAS II B BANTUL	8,826,112,000	8,811,190,155	99.83%
20	RUPBASAN KELAS II BANTUL	2,115,223,000	2,110,129,974	99.76%
21	RUPBASAN KELAS II WONOSARI	1,818,981,000	1,812,915,750	99.67%
22	LAPAS KELAS II B SLEMAN	12,461,879,000	12,409,192,094	99.58%
23	RUTAN KELAS II B WATES	6,494,719,000	6,454,188,009	99.38%
24	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK	5,207,455,000	5,166,961,872	99.22%
25	KANIM KELAS I YOGYAKARTA	21,276,061,000	20,550,223,866	96.59%
	<b>Total</b>	<b>171,539,063,000</b>	<b>170,496,408,903</b>	<b>99.39%</b>

## BAB IV

### PENUTUPAN

#### A. Kesimpulan

Penyusunan laporan Tahunan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY selama Tahun Anggaran 2024, ini merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan baik dan lancar, khususnya di wilayah. Laporan Tahunan ini menyajikan pencapaian kinerja dan kegiatan selama satu tahun berjalan yang dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi setiap kegiatan yang telah dilaksanakan, hasil yang telah dicapai, Sebagai barometer pelaksanaan kegiatan, realisasi anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY dan jajaran berada pada angka 99,39 % (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh sembilan persen)/ data pertanggal 31 Desember 2024. Selain itu, sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas selama tahun anggaran 2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY juga memperoleh penghargaan dari berbagai instansi di Daerah Istimewa Yogyakarta, baik vertikal maupun horisontal, antara lain menerima Penghargaan Digital Government Award, Kementerian Terbaik dalam Penerapan SPBE, menerima Penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta kategori IKPA terbaik PAGU kecil dan Mikro.

#### B. Rencana Kerja tahun 2025

Selanjutnya, dari uraian Laporan Tahunan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY Tahun 2024 tersebut, terdapat beberapa catatan dan rencana tindak lanjut hal-hal yang harus dilakukan oleh seluruh Jajaran Kementerian Hukum dan HAM DIY dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

1. Memperbaiki mekanisme dan meningkatkan pelayanan administrasi baik tingkat kualitas maupun kuantitas mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana melalui berbagai program maupun kegiatan;
2. Peningkatan komitmen antar Divisi di Jajaran Kementerian Hukum dan HAM DIY dalam penerapan manajemen berbasis kinerja, khususnya dalam perencanaan kinerja maupun monitoring dan evaluasi capaian kinerja;
3. Peningkatan upaya koordinasi dengan berbagai Instansi terkait baik pusat maupun daerah akan dilakukan lebih intensif;
4. Mempertimbangkan saran dari *stakeholder* terkait dalam rangka peningkatan kinerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY;

5. Perlunya peningkatan pelayanan publik sehingga Kantor Wilayah harus benar-benar lebih berintegritas dalam melayani Masyarakat;

Divisi Administrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kegiatan di Kantor Wilayah dengan memaksimalkan peran eselon III dan IV</li> <li>2. Melakukan koordinasi dan komunikasi antar divisi melalui pelaksanaan rapat kerja lintas divisi secara periodik</li> <li>3. Pelaksanaan kinerja harus mengacu pada rencana kerja yang telah dibuat oleh masing-masing pelaksana kegiatan</li> <li>4. Realisasi anggaran dengan tingkat penyerapan yang tinggi diawal tahun anggaran</li> <li>5. Mampu mewujudkan Kantor Wilayah Kemenkumham D.I.Yogyakarta menjadi urutan 5 besar Kanwil terbaik</li> <li>6. Tim saber Pungli diharapkan dapat berperan aktif dalam pemberantasan pungli di Kantor Wilayah Kemenkumham D.I.Yogyakarta</li> </ol>
Divisi Pemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian informasi terkait bebas pungli kepada seluruh pegawai di UPT Pemasyarakatan secara berkesinambungan;</li> <li>2. Pemetaan dan pemberian peringatan kepada petugas yang terindikasi melakukan pungli;</li> <li>3. Penindakan kepada pelaku pungli;</li> <li>4. Memberikan arahan terkait kapasitas operator (operator SIMAK BMN, SAIBA, RKA-KL, SDP, PB, CMB, CB, dan Remisi) melalui pelatihan;</li> <li>5. Meningkatkan peran pengawasan dan pengendalian masing- masing petugas;</li> <li>6. Memberikan rewards dan punishment kepada petugas pemasyarakatan.</li> </ol>
Divisi Imigrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lebih memperhatikan pelayanan perizinan terutama ijin tinggal keimigrasian yang dilaporkan oleh Kanim yogyakarta;</li> <li>2. Pembayaran PNBPN layanan Izin Tinggal secara online;</li> <li>3. Pendaftaran Permohonan Izin Tinggal secara online;</li> <li>4. Memaksimalkan Unit Layanan Paspur UKK Kulon Progo.</li> </ol>
Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kompetensi SDM bagian Pelayanan, memenuhi sarana dan prasana yang memadai, memaksimalkan peran PPNS di Kanwil.</li> <li>2. Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan instansi terkait pelaksanaan semua kegiatan di Divisi Pelayanan Hukum</li> <li>3. Meningkatkan Koordinasi dengan Pusat</li> <li>4. Kegiatan sosialisasi terkait pelayanan hukum wajib memberikan dampak positif bagi pelayanan publik</li> </ol>

Perlu disadari bahwa pekerjaan tugas dan tanggung jawab di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY sangatlah kompleks dan tentu saja membutuhkan kerjasama seluruh *stake holder* dan jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY. Oleh sebab itu, diperlukan beberapa tahapan dimulai dengan dilakukannya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY dengan baik.

Tahap berikutnya adalah perlu adanya penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak atau instansi terkait, seluruh *stake holder*, sehingga rencana kegiatan dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal berdaya guna dan berhasil guna dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, dalam hal perencanaan, perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh SDM yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, maka akan dapat mewujudkan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas di Kementerian Hukum dan HAM secara optimal dan terpadu.

Semoga Laporan Tahunan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY yang disusun dapat memenuhi harapan sebagai pelaporan hasil pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan dengan Tahun Anggaran 2024 serta menyediakan informasi penting terkait pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024 sebagai salah satu bentuk akuntabilitas kepada publik.

Yogyakarta, Januari 2025  
Kepala Kantor Wilayah



